

GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE : PERAN AUDIT INTERNAL
(Studi Pada Universitas Sulawesi Barat)



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Akuntansi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh
IIN EKASAWITRY
90400114105

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iin Ekasawitry

NIM : 90400114105

Tempat/Tgl. Lahir : Tinambung, 23 Juni 1997

Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : BTN Mega Rezky

Judul : *Good University Governance* : Peran Audit Internal (Studi pada Universitas Sulawesi Barat)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S A R

Samata-Gowa, November 2018

Penyusun,

Iin Ekasawitry
NIM. 90400114105



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romang polong – Gowa . ■ 424835,
Fax424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Good University Governance : Peran Audit Internal (Studi pada Universitas Sulawesi Barat)”**, yang disusun oleh **Iin Ekasawitry**, NIM: 90400114105, Mahasiswi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, bertepatan dengan 18 Shafar 1440 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi.

Samata-Gowa, November 2018

..... 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Memen Suwandi, S.E., M.Si	(.....)
Penguji II	: Dr. Urbanus Uma Leu, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Lince Bulutoding, S.E., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Akil Rahman, S.E., M. Si	(.....)

Diketahui Oleh :

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**



Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis persembahkan keharibaan Allah Rabbal Alamin, zat yang menurut Al-Qur'an kepada yang tidak diragukan sedikitpun ajaran yang dikandungnya, yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan Salam kepada rasulullah Muhammad SAW. yang merupakan rahmatan Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari lumpur jahiliyah, menuju kepada peradaban yang Islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi obor bagi perjalanan hidup manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat.

Skripsi dengan judul ***“Good University Governance : Peran Audit Internal”*** penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sejak awal terlintas dalam pikiran penulis akan adanya hambatan dan rintangan, namun dengan adanya bantuan moril maupun materil dari segenap pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis. Menyadari hal tersebut, maka penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada orang tua tercinta Ayahanda Mujahidin dan Ibunda Zamrah serta Ibunda Nur Jannah yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis.

Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Jamaluddin M., SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar
4. Bapak Memen Suwandi SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Andi Wawo, S.E., Ak selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat kepada penulis.
6. Ibu Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak selaku pembimbing I sekaligus penguji komprehensif dan Bapak Muh. Akil Rahman, S.E., M.Si selaku pembimbing II yang dengan keikhlasannya telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi ini. Penulis secara pribadi memohon maaf atas segala kekurangan serta kekhilafan jikalau sempat membuat kecewa selama proses bimbingan skripsi ini, semoga doa dan dukungan Bapak dan Ibu menjadi berkah untuk penulis kedepannya.
7. Bapak Dr. Syaharuddin, M. Si. dan Bapak Dr. Saiful, S.E., M. SA., Ak selaku penguji komprehensif yang telah meluangkan waktunya selama proses ujian komprehensif ini hingga penulis dapat melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu seminar hasil.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Penulis

ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen atas kesalahan dan tingkah laku yang penulis lakukan selama ini, baik sewaktu kuliah dan selama penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh staf akademik, staf tata usaha, serta staf jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
10. Pemerintah Kota Makassar yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Eko Hardiansyah S, S. Ak, sosok kakak yang luar biasa dalam memberikan motivasi dan mendampingi penulis selama ini. Terimakasih atas waktu dan semua sumbangsi yang telah diberikan sampai penulis bisa mencapai tahap ini.
12. Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon serta seluruh atlet Indonesia yang telah menjadi inspirasi penulis untuk menyelesaikan studi melalui prestasi-prestasi yang telah dicapai. Terimakasih dan semoga semangat juang selalu ada dan selalu jadi inspirasi kaum muda untuk selalu berprestasi.
13. Sahabat seperjuangan Try Sutriani, Rosdiana, Yulia Cantika, Iin Ekasawitry, dan Nirgahayu. Terima kasih atas segala dukungan, pengalaman dan cerita yang telah kita rangkai bersama.
14. Rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2014 (Contabilita) terima kasih atas segala motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini serta telah menjadi teman yang hebat bagi penulis.
15. Teman-teman KKN angkatan 58 Kec. Herlang Kab. Bulukumba terkhusus Bontokamase's Squad, terimakasih atas kebersamaan dan cerita hidup singkat namun penuh makna selama 45 hari.

16. Seluruh mahasiswa jurusan akuntansi UIN Alauddin Makassar, Kakak-kakak maupun adik-adik tercinta, terimakasih atas persaudaraannya.
17. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, organisasi dimana tempat penulis belajar banyak hal dan membangun kebersamaan dan pengalaman yang luar biasa.
18. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai upaya maksimal dan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada UIN Alauddin Makassar dan semoga skripsi yang penulis persembahkan ini dapat bermanfaat. Aamiin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datanganya dari penulis. Kiranya dengan semakin bertambahnya wawasan dan pengetahuan, kita semakin menyadari bahwa Allah adalah sumber segala sumber ilmu pengetahuan sehinggah dapat menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Penulis,
ALAUDDIN
M A K A S S A R

IIN EKASAWITRY
NIM. 90400114105

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1-14
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu	12
BAB II : TINJAUAN TEORETIS	15-30
A. <i>Agency Theory</i>	15
B. Teori Pengawasan.....	16
C. Audit Internal.....	17
D. <i>Good University Governance</i>	23
E. Satuan pengawas Internal.....	26
F. Peran Satuan Pengawas Internal Dalam Upaya Mewujudkan <i>Good University Governance</i>	27
G. Rerangka Pikir.....	29

BAB III : METODE PENELITIAN	31-39
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Waktu Penelitian	32
D. Pendekatan Penelitian	32
E. Jenis dan Sumber Data	34
F. Metode Pengumpulan data	35
G. Instrumen Penelitian	36
H. Metode Analisis Data	36
I. Pengujian Keabsahan Data	37
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40-67
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	40
1. Sejarah Universitas Sulawesi Barat	40
2. Visi dan Misi Universitas Sulawesi Barat	50
B. Pembahasan Data Hasil Penelitian	50
1. Penerapan Audit Internal Pada Universitas Sulawesi Barat	50
2. Pelaksanaan <i>Good University Governance</i> Pada Universitas Sulawesi Barat	56
3. Peran Auditor Internal Dalam Upaya Mewujudkan <i>Good University Governance</i>	60
BAB V : PENUTUP	68-70
A. Kesimpulan	68

B. Implikasi Penelitian.....	69
C. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71-75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 1.2 : Batas Wilayah.....	42
Tabel 1.3 : Daftar Fakultas Universitas Sulawesi Barat	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Rerangka Pikir.....	30
Gambar 2.2 : Lambang Kabupaten Majene.....	42
Gambar 2.3 : Lambang Universitas Sulawesi Barat	53



ABSTRAK

Nama : Iin Ekasawitry
NIM : 90400114105
Judul : *Good University Governance: Peran Audit Internal (Studi pada Universitas Sulawesi Barat)*

Good university governance adalah suatu konsep sistem perguruan tinggi dan pendidikan tinggi yang menetapkan tujuan, menerapkan serta mengelola institusi baik secara fisik, keuangan, sumber daya manusia, akademik maupun prestasi mahasiswa. Salah satu profesi yang menunjang terwujudnya *Good university governance* yang pada saat ini adalah auditor internal dimana ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan universitas secara efektif dan efisien. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan audit internal, untuk mengetahui pelaksanaan *good university governance* dan untuk mengetahui peran audit internal dalam upaya mewujudkan *good university governance* di Universitas Sulawesi Barat.

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yang mana pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, studi pustaka, studi dokumentasi, dan *Internet searching*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran audit internal dalam upaya mewujudkan *good university governance* di Universitas Sulawesi Barat secara teknis belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini dikarenakan universitas Sulawesi Barat yang merupakan PTNB masih dalam tahap penyesuaian untuk membenahi dirinya. Untuk selanjutnya diharapkan audit internal mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta dapat membangun kepercayaan masyarakat bahwa Universitas Sulawesi Barat bisa menjadi perguruan tinggi yang bisa diperhitungkan.

Kata Kunci : Auditor Internal, *Good University Governance*, Satuan Pengawas Internal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini dinamika pendidikan nasional mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan menguatnya komitmen bangsa untuk mewujudkan pendidikan dan menjadikan pendidikan sebagai sarana utama mewujudkan bangsa yang mandiri dan berdaya saing yang tinggi. Generasi muda merupakan investasi penting sebuah bangsa. Generasi tersebutlah yang akan menentukan arah sebuah kemunduran dan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan adalah sarana untuk membentuk kaum muda, oleh karena itu kehadiran institusi pendidikan tinggi sangat penting bagi masa depan Indonesia. Selain memiliki peran yang sangat strategis, ada juga persaingan yang ketat antar universitas di Indonesia maupun diluar negeri (Abdul, 2016). Untuk dapat menghadapi persaingan lokal dan global, perguruan tinggi harus dapat menyediakan program yang memenuhi kebutuhan pasar, unggul dalam pengembangan sains, memiliki pengendalian internal yang efektif, mampu mengelola potensi risiko dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik (Yudianti dan Suryandari, 2015).

Salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi mainstream dalam penyelenggaraan perguruan tinggi adalah konsep *good university governance* (GUG). Konsep *good university governance* ini merupakan turunan dari konsep tata pemerintahan yang lebih umum yaitu *good governance*. *Good university governance* juga adalah suatu konsep sistem perguruan tinggi dan pendidikan tinggi yang menetapkan tujuan, menerapkan serta mengelola institusi baik secara

fisik, keuangan, sumber daya manusia, akademik maupun prestasi mahasiswa. Dengan adanya konsep *good university governance* ini, kita dapat menentukan apakah pendidikan tinggi dapat digolongkan sebagai *public goods* maupun *private goods*. Hal ini sangat penting untuk bagaimana seharusnya manajemen dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik dan bagaimana seharusnya pihak perguruan tinggi menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara, akuntabilitas publik dan sebagainya. GUG merupakan sebuah konsep yang lahir dari sebuah kesadaran dimana penyelenggaraan pendidikan tinggi dan institusi perguruan tinggi memang tidak dapat disamakan dengan penyelenggaraan sebuah negara atau korporasi, yang membedakannya adalah nilai-nilai luhur pendidikan yang harus dijaga dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, maka dapat ditentukan suatu ukuran apakah suatu perguruan tinggi telah menerapkan GUG atau tidak adalah sampai sejauhmana perguruan tinggi tersebut mampu menyikapi dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraannya tanpa mengkhianati nilai-nilai luhur tadi dan amanat yang diembannya dari masyarakat, bangsa dan negara yang menaunginya (Wahab dan Rahayu, 2013).

Dalam penyelenggaraannya, sebuah institusi perguruan baiknya menerapkan prinsip-prinsip *good university governance* untuk mendukung fungsi-fungsi dan tujuan dasar pendidikan tinggi. Keistimewaan dari institusi perguruan tinggi dibanding institusi lain dapat dilihat pada fungsi dasarnya, yaitu dalam hal pendidikan, pengajaran dan usaha penemuan atau inovasi (riset). Persepsi para *stakeholders* akan kinerja *good university governance* suatu perguruan tinggi akan berdampak pada pembentukan citra universitas itu sendiri, dimana baik atau

buruknya pelaksanaan *good university governance* akan berpengaruh pada citra perguruan tinggi. Penerapan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*) secara konsisten dan berkesinambungan dapat meningkatkan budaya mutu serta pelayanan akademik dan non akademik untuk perguruan tinggi sehingga diharapkan berkontribusi pada pencitraan yang positif, reputasi yang unggul, dan kualitas daya saing yang tinggi. Model *governance* pada tiap institusi berbeda-beda. Prinsip-prinsip *good university governance* yang dapat menghasilkan *income* yaitu: *law-abiding, academic oriented, accountable, professional, independent*, dan *transparent* (Siswanto, dkk, 2013).

Konstitusi UUD 1945 menempatkan pendidikan nasional pada posisi strategis sebagai instrumen perjuangan bangsa yang tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga untuk membangun bangsa, peradaban bangsa, nilai-nilai dan moral, semangat perjuangan bangsa, serta untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang (Fakry, 2012; dalam Abdul, 2016). Berdasarkan Peraturan pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Pasal 3 yang menjelaskan bahwa perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, sebagai bentuk pengabdian serta kegiatan telaah taat kaidah dalam usaha mencari kebenaran atau untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 4 tahun 2014 juga menjelaskan dasar, tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi, dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi dengan membentuk organisasi pengawas dan penjamin mutu di Perguruan tinggi (Pasal

28 c dan 29 ayat 7). Pada PP tersebut menyatakan juga menyatakan juga bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan pada prinsip Akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjamin mutu, efektifitas dan efesiensi, otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud diatas meliputi bidang akademik dan bidang nono akademik (Pasal 22 ayat 3)

Kegiatan pengelolaan anggaran tidak lepas dari kegiatan tata kelola (*governance*) sebuah organisasi. Dengan konsep *good governance*, tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*) relevan dengan prinsip *good corporate governance* (GCG). Prinsip-prinsip tersebut meliputi: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Prinsip GCG tersebut dapat diterapkan dalam mengelola sebuah perguruan tinggi (Wijatno, 2009). *Good governance* juga memberikan sebuah struktur yang dapat memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran organisasi, sekaligus sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja manajerial (Darmawati, Khomsiyah dan Rahayu, 2004).

Good university governance sebagai bagian implementasi dari penerapan *good corporate governance* diperguruan tinggi negeri akan dapat terwujud jika terjadi keseimbangan kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam rangka untuk mencapai tujuan perguruan tinggi. Perguruan tinggi memerlukan pengelolaan yang baik karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks kehidupan masyarakat sekarang, pendidikan menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Pendidikan telah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Bahkan, pendidikan telah menjadi semacam

rumus yang dijadikan prasyarat bagi sebuah bangsa untuk bisa disebut maju (modern). Akuntabilitas adalah salah satu kebutuhan utama dalam *good university*. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perguruan tinggi. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja financial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Kusuma, 2012).

Para penganjur *good university governance* percaya bahwa dengan adanya akuntabilitas dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa karena meningkatnya motivasi belajar, meningkatnya keterlibatan orang tua, serta meningkatnya kurikulum dan pengajaran (Rosyid, dkk, 2014). Wina dan Khairani, (2015) mengungkapkan bahwa dengan menerapkan akuntansi yang baik oleh pihak perguruan tinggi serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun pihak eksternal terhadap kualitas laporan keuangan diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja perguruan tinggi sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan tersebut dapat optimal. Perbaikan terhadap kualitas akuntabilitas dan kinerja audit internal diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan *good university governance* dapat diwujudkan.

Sebuah universitas membutuhkan sistem yang mampu memastikan proses akuntabilitas mereka melalui pengendalian internal yang efektif dalam organisasi pendidikan. Sistem pengendalian internal yang handal dan efektif tidak hanya diperlukan dan ditujukan untuk organisasi yang berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga untuk organisasi nirlaba dalam hal ini universitas. Melalui

penerapan pengendalian internal yang handal, perguruan tinggi yang dapat secara efektif dan efisien memperbaiki pencapaian tujuan organisasi serta beradaptasi di lingkungan organisasi. Secara umum, pengendalian internal didefinisikan sebagai proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personil lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan yang terkait dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan (COSO, 2013).

Namun pendapat lain juga mengemukakan prinsip-prinsip *governance* secara umum yang berlaku di institusi (Aurangzeb & Asif, 2012). Salah satu profesi yang menunjang terwujudnya *good university governance* yang pada saat ini adalah auditor internal dimana ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan universitas secara efektif dan efisien. Seperti dalam penelitian Muljo, dkk, (2014) menyatakan bahwa pencapaian *good university governance* juga sangat dipengaruhi oleh satuan pengawasan internal. Makin meningkat peran auditor, maka akan memengaruhi peningkatan tata kelola suatu institusi pendidikan (Sukirman & Sari, 2012). Peranan audit internal pada saat ini sangat diperlukan di berbagai institusi, tidak terkecuali untuk perguruan tinggi. Peranan audit internal diharapkan oleh manajemen dapat mencurahkan perhatian pada tugas pengelolaan, sedangkan tugas pengawasan sehari-hari atas perusahaan dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan efektif tanpa mengurangi tanggungjawabnya (Sari dan Raharja, 2012).

Manajemen pengelolaan keuangan Universitas Sulawesi Barat mulai disorot. Sejumlah masalah mulai terkuak, mulai soal gaji non PNS hingga penggunaan anggaran tahun 2015 hingga 2017, diduga banyak digunakan kepada

hal yang tidak produktif. Al-Bukhori, (2018) menyebutkan anggaran yang masuk dan data realisasi anggaran tidak pernah transparan. Puluhan mahasiswa UnSulbar juga sempat menggelar unjuk rasa dimana dalam aksi tersebut menyampaikan tujuh tuntutan pada Universitas salah satunya menuntut transparansi pengelolaan dana di kampus dimana pengelolaan dana di kampus itu lebih mengutamakan pelayanan bidang akademik termasuk peningkatan fasilitas perkuliahan (Nurkhalisa, 2017). Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat, Arif Ardiyanto dan Korwas Bidang IPP, Baharuddin Rahman sempat melakukan kunjungan koordinasi kepada pimpinan Universitas Sulawesi Barat dan diterima oleh Wakil Rektor II, Anwar Sulili dan staf. Dalam kunjungan tersebut, Arif Ardiyanto menyampaikan perlunya pembenahan tata kelola kas dan piutang sehingga dapat menghasilkan informasi yang handal dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan (BPKP, 2017)

Dalam menghadapi tantang perwujudan *good governance* dalam hal ini *good university governance (GUG)*, Universitas Sulawesi Barat memerlukan peran audit internal yang bertugas meneliti mengevaluasi suatu sistem akuntansi serta menilai kebijakan manajemen yang dilaksanakan. Satuan Pengawas Intern (SPI) merupakan salah satu satuan kinerja yang menunjang terwujudnya *good university governance (GUG)* yang pada saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan universitas secara efektif dan efisien. Untuk mengevaluasi jalannya operasi dari aktivitas audit internal, direktur audit internal harus menetapkan dan memelihara program jaminan atas kualitas (*Quality Assurance*). *Quality assurance* sangat diperlukan dalam menjaga

kemampuan departemen audit internal untuk melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien (Ardianto, 2012).

Perguruan tinggi mampu memberikan kontribusi positif melalui pengimplementasian lima prinsip *good university governance* (GUG) yang dibantu oleh satker-satker, salah satunya adalah Satuan Pengawas Intern (SPI) yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Selain itu, sistem pengendalian internal atau *internal control* merupakan unsur yang sangat penting dalam penerapan *good governance*. Sistem pengendalian yang efektif dapat menjamin operasi perusahaan yang efektif dan efisien serta dipatuhinya aturan-aturan internal perusahaan sehingga dapat terciptanya akuntabilitas (Gusnardi, 2008).

Menurut Yudianti dan Suryandari (2015) pengendalian internal merupakan sistem sedangkan satuan pengawasan intern adalah organ atau unit yang menjalankannya. Peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan pengendalian internal yang baik diharapkan membantu pimpinan unit kerja dalam mencapai tujuan yaitu terwujudnya *good university governance* (GUG). Sistem pengendalian internal mewakili semua kebijakan dan prosedur yang disetujui oleh manajemen untuk mencapai suatu manajemen bisnis yang efektif. Kontrol Sistem meliputi pengendalian internal dan internal prosedur (Mihaela dan Julian, 2012). Semua bantuan audit internal dapat diberikan melalui analisis-analisis, penilaian, saran, bimbingan serta informasi tentang aktivitas yang diperiksa (Pratiwi, 2012)

Penelitian mengenai keterkaitan peran Satuan Pengawas Intern (SPI) dengan *good university governance* (GUG) pernah dilakukan diantaranya Puspitarini, *et.al* (2013) yang meneliti tentang Pengaruh Satuan Pengawasan

Intern (SPI) terhadap upaya mewujudkan *good university governance (GUG)*. Hasil penelitiannya bahwa auditor intern memiliki peran yang cukup besar dalam upaya pencapaiannya *good university governance* merupakan konsep pengelolaan yang dapat menunjang keberlangsungan usaha perguruan tinggi.

Penelitian juga dilakukan oleh Saptapradipta (2013) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh auditor internal dan internal control terhadap pelaksanaan *good governance*. Dari hasil penelitiannya menerangkan bahwa terdapat hubungan *internal auditor* dan *internal control* terhadap pencapaian *good governance*. Hal ini memberikan keyakinan bahwa untuk menciptakan *good governance* harus pula di dukung dengan adanya *internal control* atau pengawasan internal yang dalam hal ini di lingkup perguruan tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“*Good University Governance: Peran Audit Internal (Studi Pada Universitas Sulawesi Barat)*”**

B. Rumusan Masalah

Dalam menghadapi tantangan perwujudan *good governance*, dalam hal ini *good university governance (GUG)* Universitas Sulawesi Barat memerlukan peran audit internal yang bertugas meneliti, mengevaluasi suatu sistem akuntansi serta menilai kebijakan manajemen yang dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan audit internal pada Universitas Sulawesi Barat ?
2. Bagaimana pelaksanaan *good university governance* pada Universitas Sulawesi Barat ?

3. Bagaimana peran audit internal dalam upaya mewujudkan *good university governance* pada Universitas Sulawesi Barat

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah peran audit internal dalam upaya mewujudkan *good university governance*. *Good university governance* merupakan turunan dari konsep tata pemerintahan yang lebih umum, yaitu *good governance*. *good university governance* ini merupakan sebuah konsep yang muncul karena kesadaran bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dan instansi perguruan tinggi memang tidak dapat disamakan dengan penyelenggaraan sebuah negara atau korporasi, yang membedakan adalah nilai-nilai luhur pendidikan yang harus dijaga dalam pelaksanaannya.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mengetahui penerapan audit internal pada Universitas Sulawesi Barat
2. Mengetahui pelaksanaan *good university governance* pada Universitas Sulawesi Barat
3. Mengetahui peran audit internal dalam upaya mewujudkan *good university governance* pada Universitas Sulawesi Barat

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan acuan bagi universitas untuk menata kembali audit internal atau Satuan Pengawas Internal (SPI) yang bertugas meneliti dan mengevaluasi suatu sistem akuntansi serta menilai kebijakan manajemen yang dilaksanakan dan sebagai penunjang terwujudnya *good university governance*. Dengan digunakannya teori agen (Agency Theory). Dalam kaitannya dengan audit internal atau SPI, teori agen menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan para stakeholder membuat pentingnya satuan pengawas internal di Universitas Sulawesi Barat untuk menghindari kecenderungan dari pihak manajemen yang menginginkan keuntungan pribadi dan penyalahgunaan pemerintah dana yang diperoleh dari pemerintah. Sedangkan teori pengawasan yang digagas oleh George R. Tery mendefenisikan tugas dari audit internal untuk mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan kolektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Jadi, dapat disimpulkan teori agen dan pengawasan dapat digunakan sebagai landasan auditor internal dalam memenuhi tanggungjawabnya terhadap perguruan tinggi agar bekerja dengan mengoptimalkan kepentingan publik bukan untuk kepentingan

individu semata guna menciptakan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan dapat dipercaya dipercaya oleh masyarakatnya sendiri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan Satuan Pengawas Internal mampu menjawab tantangan dalam perwujudan *good university governance* (GUG). Jadi dapat dikatakan bahwa peningkatan peran auditor internal akan mempengaruhi tata kelola suatu institusi pendidikan. Pengelolaan perguruan tinggi yang baik akan dapat menjamin keberlangsungan usaha perguruan tinggi dalam jangka panjang. Bagi akademisi, sebagai wawasan, pengetahuan dan acuan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang lebih lanjut. Bagi peneliti, sebagai pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi keilmuan dan mengetahui sejauh mana teori yang didapat dibangku kuliah dapat diterapkan didalam masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *good university governance* merupakan salah satu bentuk topik yang selalu diangkat dalam penelitian pada bidang akuntansi. Dalam hal ini menyangkut bagaimana peran auditor internal pada peningkatan mutu pendidikan bangsa.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Novian Dyah Puspitarini, Sukirman, & Indah Anisykurlillah (2013)	Peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam pencapaian <i>Good university governance</i> (GUG) pada Perguruan Tinggi Se- Jawa yang berstatus pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)	Kuantitatif	Satuan Pengawas Intern (SPI) berpengaruh posisiif dalam pencapaian <i>Good university governance</i> (GUG)
Saptapradipta, Patricia (2013)	Pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan <i>Good Governance</i> (Studi empiris pada Layanan Umum Universitas Brawijaya Malang)	Kuantitatif	Auditor internal dan pengendalian internal berpengaruh terhadap pelaksanaan <i>Good Governance</i> pada Badan layanan Umum Universitas Brawijaya Malang
Sukirman & Maylia Promo Sari (2012)	Peran Internal Audit dalam Upaya mewujudkan <i>Good university governance</i> di UNNES	Kuantitatif	Terdapat pengaruh yang signifikan anatara peran auditor internal terhadap <i>Good university governance</i>
Yudhi Ardianto (2012)	Evaluasi efektifitas satuan pengawas intern (Studi pada perusahaan BUMN)	Kualitatif Deskriptif	Dengan adanya kualitas yang baik maka keefektifan fungsi satuan pengawas intern sebagai aparatur

			pengawas audit internal dapat tercapai
Mihela, Dumitrascu & Savulescu Julian (2012)	<i>Internal Control and The Impaction Corporate Governance, in Romanian Listed Companies</i>	Kualitatif	Internal control mengarah pada pengujian wajar laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan para stakeholder dan auditor dapat meminimalisir resiko pengendalian.
Ryke Octava Pratiwi (2012)	Evaluasi efektivitas fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam melaksanakan Audit Internal	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan pemahaman tentang prosedur belum sepenuhnya dilaksanakan dilaksanakan manajemen Mutu.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Agency Theory

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *agency theory*. Teori keagenan merupakan teori utama (*grand theory*) atas pemanfaatan jasa Satuan Pengawas Internal oleh sebuah instansi. Dalam kaitannya dengan peran audit internal, teori keagenan yang dikembangkan oleh Jansen dan Meckling (1976) ini menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dengan para pemegang saham (*stakeholder*), dan konflik tersebut menjadi pemicu perhatian manajemen (Rustiriani, 2010). Dalam kaitannya dengan SPI, teori ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara *stakeholder*, membuat pentingnya satuan pengawas internal di Universitas Sulawesi Barat. Kecenderungan dari pihak manajemen Universitas Sulawesi Barat yang menginginkan keuntungan pribadi, akan membuat dana yang diperoleh dari pemerintah mudah disalahgunakan. Oleh karena itu diperlukan peran dari Satuan Pengawas Internal dengan tujuan ketika hendak mengambil tindakan dapat maksimal tanpa ada kecanggungan. Manajemen Unsulbar merupakan pegawai yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola aset negara. Oleh karena itu Unsulbar merupakan salah satu Universitas milik pemerintah, Unsulbar mendapatkan bantuan dana pengelolaan dari pemerintah melalui APBN dan APBD dengan tujuan peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan untuk kesejahteraan rakyat secara luas.

Dengan demikian, manajemen Unsulbar merupakan salah satu agen dari pemerintah yang dipercaya untuk mengelola aset dan keuangan negara, agar tercipta suatu tujuan dari Unsulbar tersebut secara efektif dan efisien. Ketika pihak manajemen Unsulbar mampu menempatkan diri sebagai agen yang baik, maka sudah tentu *good university governance* dapat tercapai. *Agency Theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada (Wolfeshon, 1999). Dapat diperjelas bahwa kenyataan yang terjadi dilapangan, pihak manajemen dalam hal ini manajemen Unsulbar kurang dipercaya oleh *stakeholder* karena benturan kepentingannya seperti yang telah dijelaskan diatas. Manajemen cenderung memperlihatkan kondisi yang baik di dalam lingkungan Universitas untuk pencapaian kepentingan pribadi. Teori ini tidak hanya pelaksanaan *good university governance* tetapi juga mempertegas lagi bahwa pelaksanaan *good university governance* perlu ditunjang adanya peranan Satuan Pengawas Internal.

B. Teori Pengawasan

Menurut Tery (2006) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Stoner dan Freeman, pengawasan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen, sebagaimana berikut ini, yaitu: fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*).

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam fungsi manajemen. Hal ini dikarenakan tanpa pengawasan, fungsi yang lain tidak akan berjalan secara efisien, efektif dan maksimal. Boleh dikatakan bahwa masing-masing fungsi manajemen tersebut merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dan sistemik, sehingga saling mempengaruhi dan ketergantungan satu sama lain. Pengawasan juga merupakan suatu cara agar tujuan dapat tercapai dengan baik (Griffin, 2004). Dalam penelitian ini konsep pengawasan digunakan bukan sebuah perusahaan tetapi sebuah lembaga yang bertugas meneliti dan mengevaluasi suatu sistem akuntansi serta menilai kebijakan manajemen yang dilaksanakan.

C. Audit Internal

Akuntan adalah salah satu profesi yang terlibat dalam pengelolaan organisasi. Keterlibatan akuntan mencakup salah satu bagian dari manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan organisasi. Selaku akuntan, profesi tersebut adalah bagian dari manajemen organisasi sehingga dia terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas organisasi (Sundari, 2010). Menurut Sawyer (2005:10), audit internal merupakan sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan audit internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi, (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti, (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi, (5)

sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Sedangkan menurut Halim(2008:11), audit internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi yang dihasilkan ditujukan untuk manajemen organisasi itu sendiri. SIM merupakan suatu sistem yang melakukan fungsi – fungsi untuk menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi. Menurut Mulyadi (2002:210-211), tanggung jawab audit internal berkaitan dengan fungsi audit internal, dengan melakukan kegiatan penilaian yang bebas, dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Kegiatan yang dilakukan dengan menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, audit intern menyediakan jasa tersebut.

Dalam sejarah Islam, pada masa Nabi Muhammad SAW dan khulafaur rasyidin sudah ada sebuah lembaga yang memiliki fungsi seperti auditor yaitu lembaga hisbah. Lembaga ini memiliki tujuan untuk membantu umat manusia dalam beribadah kepada Allah dan juga memastikan pelaksanaan hak Allah dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan benar. Dalam Al-Qur'an pun terdapat ayat-ayat atau dalil yang penafsirannya menunjukkan bahwa Islam mengenal fungsi audit. Ayat-ayat itu adalah

1. QS. Al Insiqaq

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمَلِّقِيهِ ٦ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ٧
فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ٨

Terjemahnya :

Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelahkanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah (QS. Al-Insiqaq/84: 6-8).

2. Al Infithar: 10-12

وَأِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ١٠ كِرَامًا كُنُتِينَ ١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٢

Terjemahnya :

Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Infithar/82: 10-12).

Menurut Lawrence B. Sawyer diterjemahkan oleh Desi Adhariani (2005:109)

langkah-langkah yang harus dilakukan audit internal ialah:

1. Penentuan Risiko

Audit internal harus memiliki pemahaman mengenai proses penentuan risiko dan sarana yang digunakan untuk melakukannya serta audit internal juga harus menginput hasil penentuan risiko ke dalam program audit untuk memastikan bahwa kontrol – kontrol yang dibutuhkan benar diterapkan untuk mengurangi risiko.

2. Melaksan Survei Pendahuluan

Audit internal harus memastikan bahwa waktu dan upaya yang dihabiskan untuk survei pendahuluan bisa produktif. Survei pendahuluan yang baik akan menghasilkan program audit yang tepat dan program audit yang tepat akan menunjang keberhasilan audit.

3. Menyusun Program Audit

Program audit internal merupakan pedoman bagi auditor dan merupakan satu kesatuan dengan supervisi audit dalam pengambilan langkah-langkah audit tertentu. Langkah-langkah audit dirancang untuk mengumpulkan bahan bukti audit dan untuk memungkinkan audit internal mengemukakan pendapat mengenai efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas aktivitas yang akan diperiksa. Program tersebut berisi arahan-arahan pemeriksaan dan evaluasi informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan audit dalam ruang lingkup penugasan audit.

4. Melaksanakan Pekerjaan lapangan I

Melaksanakan proses pekerjaan lapangan merupakan proses untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan bukti secara objektif mengenai operasi entitas, mengevaluasinya, dan melihat apakah operasi tersebut memenuhi standar yang dapat diterima dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan oleh manajemen.

5. Melaksanakan Pekerjaan lapangan II

Dengan penerapan teknik-teknik audit seperti melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, menganalisis, memverifikasi, dan mengevaluasi diterapkan pada beragam kondisi.

6. Menentukan kelemahan yang ada melalui temuan audit

Temuan audit merupakan penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma atau kriteria yang dapat diterima. Temuan audit bisa memiliki bermacam-macam bentuk dan ukuran. Temuan tersebut dapat menggambarkan :

- a. Tindakan-tindakan yang seharusnya diambil, tetapi tidak dilakukan, seperti pengiriman yang dilakukan tetapi tidak tertagih.
- b. Tindakan-tindakan yang dilarang, seperti pegawai yang mengalihkan sewa dari perlengkapan perusahaan ke perusahaan kontrak pribadi untuk kepentingannya sendiri.
- c. Tindakan-tindakan tercela, seperti membayar barang dan perlengkapan pada tarif yang telah diganti yang lebih rendah pada kontrak yang lebih menguntungkan.
- d. Sistem yang tidak memuaskan, seperti diterimanya tindak lanjut yang seragam untuk klaim asuransi yang belum diterima padahal klaim tersebut bervariasi dalam jumlah dan signifikansinya.

7. Menyiapkan kertas kerja

Mendokumentasikan hasil dari audit. Kertas kerja berisi catatan informasi yang diperoleh dan analisis yang dilakukan selama proses audit. Kertas kerja disiapkan sejak saat audit pertama kali memulai penugasannya hingga mereka menelaah tindakan perbaikan dan mengakhiri proyek audit. Kertas kerja berisi dokumentasi atas langkah-langkah berikut ini dalam proses audit:

- a. Rencana audit, termasuk program audit.
- b. Pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem kontrol internal.
- c. Prosedur-prosedur audit yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai.
- d. Penelaahan kertas kerja oleh penyelia
- e. Laporan audit
- f. Tindak lanjut dari tindakan perbaikan.

Kuntadi (2009) apabila auditor internal berkualitas atau berperan dengan baik maka pengendalian internal akan lebih baik dan dengan sendirinya kinerja organisasi akan semakin meningkat. Soh dan Nonna (2011) dalam penelitiannya memberikan wawasan mengenai peranan dan tanggung jawab internal auditor (IA) serta fungsi dan faktor-faktor yang dianggap perlu untuk menjamin efektivitasnya. Dalam menjalankan tugas auditor internal harus mengacu pada Standar Auditor Internal. Standar tersebut dikeluarkan oleh Institute of Internal Audit (IIA) atau dikenal dengan Professional Practices Framework (PPF) yang meliputi Standar Profesional Audit Internal (SPAI).

Peranan audit internal adalah untuk membantu perusahaan dalam melakukan audit bagi kepentingan manajemen, memecahkan beberapa hambatan dalam sebuah organisasi dan mendukung upaya manajemen untuk membangun budaya yang mencakup etika, kejujuran, dan integritas. Sebaik apapun yang dilakukan oleh audit internal dalam pelaksanaan tugas namun apabila integritas manajemen tidak mendukung dalam upaya memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh audit internal telah dilaksanakan, maka hal tersebut menjadi sia-sia. Untuk menjalankan tugas dengan baik audit internal harus berada diluar fungsi lini suatu organisasi atau berada di luar hierarchy manajemen, tetapi tidak terlepas dari hubungan atasan-bawahan seperti lainnya atau idealnya langsung bertanggungjawab terhadap direktur. Audit internal harus mampu menjaga obyektivitas terhadap organisasi mereka dan mampu mengidentifikasi ancaman terhadap statusnya. Obyektif adalah keteguhan pendapat yang didasarkan atas fakta-fakta yang bisa diverifikasi, tidak bias dan tidak hanya tergantung pada atasan.

D. *Good university governance(GUG)*

Good governance telah menjadi hal yang penting bagi setiap entitas saat ini, tidak hanya sektor swasta, sektor publik dan pemerintahan pun memperhitungkan hal ini. *Good governance* menjadi salah satu alat ukur atau patokan bagi stakeholder dalam mengambil keputusan terutama keputusan berinvestasi. Hal ini telah dibuktikan melalui berbagai penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Bahkan pada tingkat internasional maupun nasional telah dilakukan penilaian atau pemeringkatan *good governance* pada entitas swasta maupun pemerintahan (Handayani, 2012). *Good university governance* (GUG) merupakan konsep yang diadopsi dari *good corporate governance* (GCG). *Good university governance* merupakan sebuah konsep yang muncul karena kesadaran bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dan institusi perguruan tinggi memang tidak dapat disamakan dengan penyelenggaraan sebuah negara atau korporasi, yang membedakannya adalah nilai-nilai luhur pendidikan yang harus dijaga dalam pelaksanaannya. Prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah prinsip dasar untuk membawa sebuah perguruan tinggi menuju *good university governance*. Memahami prinsip-prinsip dasar dalam *good university governance* akan memacu untuk mencari bentuk yang terbaik sebuah perguruan tinggi yang paling dekat dengan para sivitas akademika (Maryono, 2014).

Saat ini, studi tentang *corporate governance* bukanlah sebuah isu baru jika dibandingkan dengan isu mengenai *university governance*, karena studi sebelumnya tentang *good university governance* belum banyak dipublikasikan. Isu

dan studi mengenai *corporate governance* telah banyak menyita perhatian para CEO perusahaan sejak era 1990-an dan menjadi sangat populer setelah terjadi kasus runtuhnya Enron and World.com di awal tahun 2000-an. Lain halnya dengan studi tentang *corporate governance*, studi tentang *university governance* tidak didahului dengan sebuah peristiwa penting tentang kebangkrutan sebuah perguruan tinggi. Beberapa peneliti berargumentasi bahwa *corporate governance* memegang peran penting dalam pengawasan perusahaan (Fama, 1980; Fama & Jensen 1983). Kegiatan pengelolaan anggaran tidak lepas dari kegiatan tata kelola (*governance*) sebuah organisasi. Dengan konsep *good governance*, tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*) relevan dengan prinsip *good corporate governance* (GCG). Prinsip-prinsip tersebut meliputi: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Prinsip GCG tersebut dapat diterapkan dalam mengelola sebuah perguruan tinggi (Wijatno, 2009). *Good governance* juga memberikan sebuah struktur yang dapat memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran organisasi, sekaligus sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja manajerial (Darmawati, Khomsiyah dan Rahayu, 2004).

Penerapan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*) secara konsisten dan berkesinambungan dapat meningkatkan budaya mutu serta pelayanan akademik dan non akademik sebuah perguruan tinggi sehingga diharapkan berkontribusi pada pencitraan yang positif, reputasi yang

unggul, dan kualitas daya saing yang tinggi. Penerapan tata kelola yang baik juga sejalan dengan agenda reformasi keuangan negara yang mengalami pergeseran paradigma dari penganggaran tradisional menuju penganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input, tetapi pada output. Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran untuk menggunakan sumber daya pemerintah yang makin terbatas, tetapi dapat memenuhi kebutuhan dana yang makin tinggi.

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang dapat menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan atau teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Tingginya standar pengelolaan ditambah persaingan antar perguruan tinggi yang semakin ketat, sehingga pengelola dituntut untuk cermat dalam membaca tren ke depan, agar program dan kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penggunaannya. Selain itu, aspek manajemen wajib dijalankan secara tepat dan cermat. Dalam kaitan ini, maka lima prinsip umum tata kelola organisasi yang lebih dikenal dengan *good corporate governance* yang kemudian diadaptasi sebagai ciri atau prinsip *good university governance* (GUG) dapat disodorkan sebagai suatu jawaban utama. Menurut Abdul (2016) lima prinsip tersebut adalah “*Transparency, Accountability, responsibility, Indefendancy, dan Fairness*”

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi) secara sederhana diartikan sebagai keterbukaan informasi. Perusahaan atau lembaga dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *Stakeholders*
2. *Accountability* (Akuntabilitas); yang dimaksud adalah kejelasan fungsi, struktur, system, hak, kewajiban, wewenang dan pertanggungjawaban elemen organisasi
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) berupa kepatuhan organisasi terhadap peraturan yang berlaku, seperti kepatuhan terhadap pajak, keselamatan kerja, kesehatan, lingkungan sosial dan sebagainya
4. *Independency* (kemandirian); ada kemandirian dalam mengelola organisasi secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. *Fairness* (Kesetaraan dan kewajaran); prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai peraturan yang berlaku.

E. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawasan Intern (SPI) Satuan pengawasan intern merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawaban dengan cara menyediakan analisis,

rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditelaah (Sitompul, 2008:18).

Dalam melaksanakan perannya, SPI harus berpedoman pada standar profesi audit intern. Menurut Tugiman (1997:16), standart profesi audit intern meliputi independensi kemampuan profesional, lingkup pekerjaan audit intern, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta manajemen bagian audit intern.

F. Peran Satuan Pengawas Internal dalam upaya mewujudkan *Good University Governance*

Good university governance (GUG) merupakan langkah yang dapat menunjang pencapaian kualitas suatu perguruan tinggi. Menurut Wijatno (2009:119), pencapaian *good university governance* (GUG) dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan. Pada prakteknya, keseluruhannya prinsip tersebut harus diterapkan untuk mewujudkan suatu tata kelola universitas yang baik (Puspitarini, 2012). Dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha Perguruan Tinggi, pengelola perlu menerapkan konsep *good governance* dalam pengelolaan perguruan tinggi yang dikenal dengan *good university governance* (GUG). Peran audit internal dalam hal ini satuan pengawas internal harus lebih diberdayakan baik secara internal (manajemen) maupun eksternal (*stakeholder*) agar mempunyai kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan *good uniiversity governance* tersebut. Pemberdayaan auditor antara lain: pemahaman *good governance* yang lebih baik, tanggungjawab yang lebih besar dan kebebasan mengkreasi pekerjaan dalam

membantu *stakeholder* namun tidak menyalahi etika profesi yang ada (Trisnaningsih, 2007)

Pengelolaan perguruan tinggi yang baik akan dapat menjamin keberlangsungan usaha perguruan tinggi dalam jangka panjang. Secara sederhana *good university governance* dapat kita pandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar konsep *good governance* dalam system dan proses pengelolaan institusi perguruan tinggi melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan secara umum. Penerapan *good university governance* diyakini dapat meminimalkan terjadinya fraud karena dalam Perguruan Tinggi. Karena mekanisme *good university governance* akan memunculkan suatu skema pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Perguruan Tinggi. Dalam hal ini fungsi pengawasan dan pengendalian internal suatu perguruan tinggi dapat dilakukan oleh Departemen Audit Internal. Selain itu audit internal dibutuhkan untuk menilai akuntabilitas dan kepatuhan manajemen terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku untuk kepentingan para pemangku kepentingan. Hal inipun perlu dilakukan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi agar bisa menghasilkan ekonomis, efesiensi dan efektivitas (3E). Oleh karena itu, auditor internal dipandang memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan penciptaan Perguruan Tinggi yang mampu memiliki pengelolaan yang baik *good university governance* (GUG).

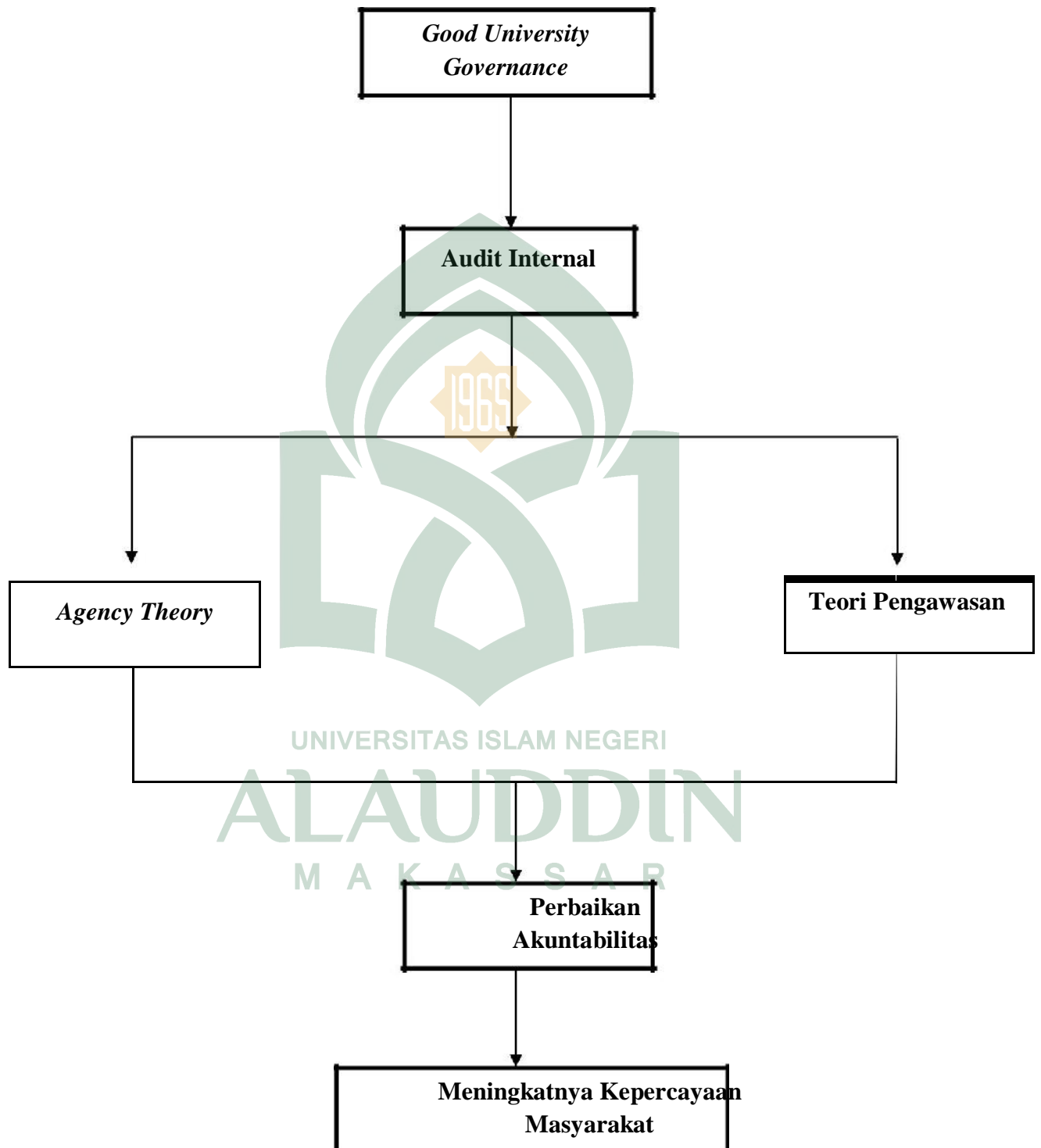
G. Rerangka Pikir

Dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha Perguruan Tinggi, pengelola perlu menerapkan konsep *good governance* dalam pengelolaan Perguruan Tinggi yang dikenal dengan *good university governance*(GUG). Pengelolaan perguruan tinggi yang baik akan dapat menjamin keberlangsungan usaha perguruan tinggi dalam jangka panjang. Penerapan GUG diyakini dapat meminimalkan terjadinya *fraud* karena dalam perguruan tinggi karena mekanisme GUG akan memunculkan suatu skema pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perguruan tinggi. Dalam hal ini fungsi pengawasan dan pengendalian internal suatu perusahaan dapat dilakukan oleh Departemen Audit Internal.



Secara lengkap rerangka pikir penelitian disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Rerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian kualitatif. Miles dan Huberman dalam Amaliah (2014), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat pada individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian Ia menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu aktivitas yang menempatkan peneliti di dunia yang memiliki banyak interpretasi sehingga membuat dunia semakin terbuka untuk memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian kualitatif didasarkan pada dua alasan, pertama permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiahnya. Penelitian kualitatif menghasilkan analisis tentang kegiatan, proses atau peristiwa-peristiwa penting (Sudjana, 2009).

Penelitian kualitatif disebut *interpretative inquiry* karena banyak melibatkan faktor subjektif, baik dari informan, subjek penelitian maupun peneliti itu sendiri (Irawan, 2006). Strauss dan Corbin (2003) menyatakan,

bahwa istilah penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dia bisa saja menggunakan data yang dapat dihitung, misalnya data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada Universitas Sulawesi Barat, yang terletak di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat - Indonesia. Penelitian dilakukan di tempat ini adalah karena tempat ini dinilai paling sesuai dengan topik penelitian. Perguruan Tinggi ini merupakan salah satu rujukan universitas dalam pengoptimalisasian Tata kelola universitas yang baik tingkat selanjutnya dari dalam maupun dari luar Provinsi Sulawesi Barat.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dipakai selama kurang lebih dua bulan yang dimana dimulai dari bulan Agustus hingga bulan September 2018.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Kata fenomenologi berasal kata dari bahasa Yunani, *phainomenon* yang berarti penampakan diri dan *logos* yang berarti akal, studi fenomenologi merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Menurut Polkinghorne (Creswell, 1998) Studi fenomenologi menggambarkan arti sebuah pengalaman hidup untuk beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Orang-orang yang terlibat dalam menangani sebuah fenomena

melakukan eksplorasi terhadap struktur kesadaran pengalaman hidup manusia. Hegel mendefinisikan fenomenologi sebagai “pengetahuan sebagaimana pengetahuan tersebut tampil atau hadir terhadap kesadaran” (*“knowledge as it appears to consciousness”*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul disekitar manusia yang terorganisasi dalam lingkup interaksi antara profesi akuntan, klien, dan *stakeholder*. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi berusaha memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Fenomenologi transendental atau yang kerap hanya disebut fenomenologi merupakan ilmu mengenai penampakan atau fenomena (Hafni, 2017). Fenomena sendiri dijelaskan sebagai fakta yang disadari dan masuk dalam pemahaman manusia. Dengan demikian, fenomena bukanlah sepenuhnya seperti apa yang tampak secara kasat mata melainkan apa yang masuk dalam kesadaran.

Dengan fenomenologi penelitian di bidang akuntansi dapat merefleksikan pengalaman peneliti dalam melihat relaitas sosial akuntansi, sejauh pengalaman tersebut secara intensif masih berhubungan dengan suatu obyek yang ditelitinya, Kuswarno (2009:1). Nurhayati (2015) Mendefinsikan fenomenologi yaitu berusaha melihat struktur yang implisit menjadi implisit dan memaknai pengalaman seseorang. Metode fenomenologi ditujukan untuk menggambarkan elemen yang mendasar dalam fenomena untuk mengungkap esensi universal yang mendasari kesadaran manusia.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dari penelitian ini adalah Data Subjek, karena data yang diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap subjek. Dalam Indriantoro (2013), menyebutkan bahwa data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (reponden). Data subjek, dengan demikian merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual. Data subjek selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan (respon) yang diberikan. Yaitu: lisan (verbal), tertulis, dan ekspresi. Penelitian ini diklasifikasikan dalam data subjek lisan (verbal) karena respon verbal diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancara.

2. Sumber Data

- a. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dimana peneliti sendiri secara langsung mencari data dari pihak yang berkompeten, dengan cara melakukan praktik wawancara. Indriantoro (2013) mengatakan bahwa data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan mewawancarai informan. .

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan dua metode yaitu metode sekunder dan metode primer. Adapun pengumpulan datanya adalah :

1. Wawancara, dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Wawancara ini dilakukan pada informan yang dianggap kompeten dan memiliki informasi yang dibutuhkan diantaranya:
 - a. Audit Internal Universitas Sulawesi Barat
 - b. Dosen Universitas Sulawesi Barat
 - c. Mahasiswa Universitas Sulawesi Barat
 - d. Media
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat (SLM)
2. Penelitian Kepustakaan, kegiatan yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan ini adalah melakukan kajian pada sumber bacaan dan berbagai penelitian terdahulu untuk mengetahui kaitan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya.
3. Studi Dokumentasi, merupakan pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen, foto, tabel dan grafik yang memuat penjelasan mengenai perusahaan,
4. *Internet Searching*, dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis

serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam yang mendukung dalam kegiatan wawancara kepada responden. Serta alat tulis untuk menulis jawaban dari responden sebagai antisipasi jika terjadi kesalahan pada alat perekam yang digunakan untuk mewawancarai dan laptop untuk mencari artikel ataupun jurnal yang terkait dengan penelitian. Namun, dalam penelitian kualitatif instrument terpenting adalah diri peneliti itu sendiri.

G. Metode Analisis Data

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2009). Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian (Moeleng, 2007). Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

2. Penyajian data

Menurut Idrus (2009) bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

H. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data untuk mendapatkan nilai kebenaran terhadap penelitian. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Sugiyono (2007:270) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal). Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility* (Validitas Internal)

Uji *Credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian di fokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan / benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan dalam atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan

merupakan salah satu cara mengontrol/ mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276). Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda disituasi sosial yang berbeda, validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. **Sekilas Kabupaten Majene**

Kabupaten Majene adalah salah satu dari 5 Kabupaten dalam wilayah propinsi Sulawesi Barat dengan panjang pantai 125 Km yang terletak di pesisir pantai Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara dengan luas 947,84 Km. Kabupaten Majene terdiri dari 8 Kecamatan yaitu Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammero'do Sendana, Tubo Sendana, Malunda dan Ulumanda, yang meliputi 40 desa dan kelurahan. Ibukota Kabupaten Majene terletak di Kecamatan Banggae dengan luas perkotaan 5.515 km, yang berada di posisi selatan Kabupaten Majene, dengan jam tempuh sekitar 3 jam sampai 4 jam dari ibukota Sulawesi Barat (Mamuju) yaitu ± 142 km. Secara geografis Kabupaten Majene terletak pada posisi 2' 38' 45" sampai dengan 3' 38' 15" Lintang Selatan dan 118'45' 00" sampai 119'4'45" Bujur Timur, dengan berbatasan di sebelah utara Kabupaten Mamuju, sebelah timur Kabupaten Polewali Mandar, sebelah selatan Teluk Mandar, dan Sebelah Barat adalah Selat Makassar. Klasifikasi kemiringan tanah secara keseluruhan relatif miring dengan persentase wilayah yang mengalami erosi sebesar 3,41 % dan luas wilayah kabupaten, dengan suhu udara antara 21 C sampai 34 C, serta jumlah hari hujan 208 hari.

Kabupaten Majene berada pada ketinggian yang bervariasi antara 0 – 1.600 meter di atas permukaan laut, Daerah ini mempunyai topografi yang

sebagian besar merupakan lahan perbukitan dengan vegetasi yang mulai rusak akibat adanya pembukaan hutan menjadi sawah ladang (30% dari luas total 94,784 ha). Sisa dari lahan yang ada berupa daratan aluvial pantai dan batuan gamping (70%) sehingga potensi aliran sungai gunung dan mata air terbatas, apalagi di musim kemarau.

Jumlah penduduk Kabupaten Majene adalah 137.474 jiwa yang terdiri dari jumlah pria 66.494 jiwa dan jumlah perempuan 70.980 jiwa dengan kepadatan 1.060 jiwa per km untuk Kota Majene (Kec. Banggae). Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Majene adalah 0,21% pertahun, dan 1,40% pertahun untuk Kota Majene. Penduduk Kabupaten Majene mayoritas beragama Islam 137.214 jiwa, Kristen 256 jiwa, Hindu 0 jiwa, Budha 4 jiwa dengan sarana peribadatan yaitu Masjid 214 buah, Langgar 61 buah, Musholla 40 buah dan gereja 1 buah (Ardi, 2013)

2. Geografis Kabupaten Majene

Secara geografis, Kabupaten Majene terletak pada 2°38' - 3°38' Lintang Selatan dan 118°45' - 119°4' Bujur Timur. Kabupaten Majene berada di pesisir barat Pulau Sulawesi yang berjarak sekitar 143 Km dari ibu kota provinsi Sulawesi Barat, Mamuju dan sejauh 378 Km berkendara dari Kota Makassar.

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Batas wilayah

Utara	Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa
Selatan	Teluk Mandar
Barat	Selat Makassar
Timur	Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa

3. Lambang Kabupaten Majene

Gambar 2.3
Lambang Kabupaten Majene



Motto : *"takkali nisobalang dotai lele ruppu' dadzi nalele tuali dilolangang"*

4. Sejarah Universitas Sulawesi Barat

Tanggal 19 Februari 2011 , merupakan tonggak sejarah berdirinya Universitas Sulawesi Barat Untuk dijadikan sebagai Universitas Negeri. Proses pendirian Universitas Sulawesi Barat ditandai dengan Pendirian Yayasan Indonesia Sulawesi Barat sebagai wadah untuk pendirian Unsulbar. Awalnya Unsulbar digagas oleh para pejuang pembentukan Provinsi Sulbar, seperti Prof.

Dr. Basri Hasanuddin, MA, Prof. Ma'mun Hasanuddin, SH, MH, Dr. Rahmat Hasanuddin, SE, M. Si, dan Drs. Anwar Adnan Saleh, serta seluruh civitas baik dari Unhas, UNM, UIN dan lain-lain. Pada tanggal 10 Juli 2013, berlangsung pertemuan terbatas yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Makassar. Dari pemerintah kabupaten Majene hadir bupati Majene (Drs. Muh. Darwis), Sekretaris daerah (Drs. Saggaf Katta) sedangkan dari Tim Perencanaan Universitas Sulawesi Barat hadir Prof. Dr. Basri Hasanuddin, M.A; Prof. Dr. Noor Djalaluddin, M.Sc (Almarhum); Prof. Dr. H. Ma'mun Hasanuddin; Rahmat Hasanuddin, M.Si dan Dr. Muh. Amri. Meski tanpa nota kesepakatan, tetapi pertemuan itu telah menghasilkan komitmen bersama atas dasar saling percaya sebagai pemegang amanah perjuangan sesuai hasil kongres rakyat mandar bulan Januari 2001. Pemerintah kabupaten Majene akan membantu sesuai dengan kemampuan yang tersedia sedangkan pihak Tim atau Pokja akan menyelesaikan tugas-tugas administrasi dan menyiapkan semua syarat-syarat yang diminta oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Atas dasar komitmen inilah maka perjuangan dan kerja keras mulai dilakukan oleh Tim pembentukan Universitas Sulawesi Barat. Meski pada pertengahan tahun 2003 Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA memperoleh tugas dari presiden Megawati sebagai duta besar RI di Iran, tetapi semua kegiatan dan upaya pendirian Universitas Sulawesi Barat tetap berlangsung dan dipantau terus dari Teheran, Iran. Pada akhir tahun 2003, Drs. Muh. Darwis dan rahmat Hasanuddin sempat berkunjung ke Tehran, Iran dan melaporkan antara lain proses pendirian Universitas Sulawesi Barat.

Pada akhir tahun 2003, Tim penyusun proposal pendirian Universitas Sulawesi Barat yang diketuai oleh Dr. Akhsan Djalaludiin telah berhasil menyelesaikan tugasnya dan segera mengirimkan proposal tersebut ke Departemen Pendidikan Nasional. Para tim persiapan pendirian Universitas Sulawesi Barat berpendapat bahwa inilah jalan pintas meski politis untuk menyegerakan izin Universitas Sulawesi Barat. DP3SB, KAPP Sulbar dan Tim Proposal mulai melakukan pendekatan dengan dirjen dikti sambil mendesak agar izin Universitas Sulawesi Barat dapat diterbitkan karena presiden Megawati akan mengunjungi Mandar dan salah satu agendanya ialah meresmikan sebuah perguruan tinggi yang proposalnya sudah diserahkan. Sebuah maket kampus lalu dibuat dan sebuah prasasti mulai dirancang. Namun karena syarat-syarat penting dan mendasar belum dipenuhi maka Direktur Jendral Pendidikan Perguruan Tinggi, Prof. Dr. Satrio keberatan mengeluarkan izin meski menteri pendidikan nasional, Prof. Dr. Bambang Sudibyo pada dasarnya tidak keberatan, bahkan setuju untuk langsung berstatus negeri. Izin operasional Universitas Sulawesi Barat sendiri masih mengendap dengan sejumlah tanda tanya karena Prof. Dr. Satrio dengan tegas menolak proses izin yang diterbitkan berdasarkan tekanan politik, tanpa didukung oleh syarat-syarat administrasi yang lengkap. Maka seperti yang kita ketahui, pendirian Universitas Sulawesi Barat ternyata memerlukan waktu tiga tahun untuk memperjuangkan dengan liku-liku perjalanan yang sungguh menguras energi.

Seperti telah diuraikan didepan, pada akhir tahun 2003 sebuah proposal pendirian Universitas Sulawesi Barat berhasil disusun dan sudah siap untuk

dikirim ke Menteri Pendidikan nasional. Oleh karena perguruan tinggi yang didirikan berstatus swasta, maka terlebih dahulu harus didirikan sebuah yayasan yang bertindak sebagai badan hukum penyelenggara. Setelah melalui beberapa pertemuan, maka sebuah Yayasan didirikan dengan nama “Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat” disingkat Yapisbar. Yayasan inilah yang kemudian mengirim proposal ke Menteri Pendidikan Nasional pada awal tahun 2004 untuk mendapatkan izin operasional. Yayasan ini didirikan pertamakali dengan akta notaris no. 08 tanggal 19 Januari 2004 dengan menetapkan Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA sebagai ketua dewan pembina, Prof. Dr. Abd. Muin Liwa, MS sebagai ketua beserta dua wakil ketua yaitu Drs. Muh. Darwis dan Rahmat Hasanuddin, SE., M.Si., sekretaris Prof. Dr. Arifin Amril dan ketua dewan pengawas Prof. Dr. Noor Djalaluddin, M.Sc.

Setelah melalui proses panjang maka izin operasional baru dikeluarkan oleh Mendiknas tanggal 31 November 2007 No. 229/D/O/2007 kepada Yapisbar selaku badan hukum penyelenggara. Diperlukan waktu sekitar 3 tahun setelah provinsi Sulawesi Barat berdiri barulah izin operasional Unsulbar diterbitkan. Tentu saja ada pertanyaan mengapa untuk mengurus izin operasional Universitas Sulawesi Barat begitu lama? Jawabannya ialah bahwa membangun institusi memang memerlukan waktu lebih lama dibanding dengan membangun jalan raya, bangunan fisik bahkan bendungan sekalipun. Pembangunan fisik terukur sedangkan pembangunan institusi apalagi menyangkut perizinan tak dapat diukur karena melibatkan birokrasi yang rumit dan aturan-aturan yang *rigid*. Namun semua kerumitan administrasi relatif mudah diselesaikan kecuali satu hal yaitu

karena Yapisbar cukup lama mencari mitra perguruan tinggi yang bersedia untuk merger. Baru pada tahun 2006 solusi itu ditemukan dan menjadi cikal bakal Universitas Sulawesi Barat, yaitu adanya Sekolah Tinggi Pertanian di Pinrang oleh Kopertis Wilayah IX didorong untuk bermitra dengan Akademi Keperawatan Yayasan Pendidikan Marendeng. Berkat dorongan dan *support* Koordinator Kopertis Wilayah IX (Prof. Dr. Aminuddin Salle, SH) dan sekretaris pelaksanaannya (Drs. Ibrahim Saman, MM) proses *merger* berlangsung dengan mulus sehingga Yapisbar dapat mengajukan proposal baru yang memuat dua perguruan tinggi. Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat selaku pengusul proposal kemudian dengan tekun dan serius mengurus izin operasional dan akhirnya berhasil diterbitkan pada bulan November 2007.

Maka ketika izin operasional berhasil diperoleh, Yapisbar segera melakukan langkah-langkah penting dan prioritas yaitu menetapkan para pejabat pengelola, mulai dari Rektor, Pembantu rektor dan Dekan-dekan. Prof. Dr. Ma'mun Hasanuddin, SH, MH yang semula diproyeksikan menjadi rektor pertama, oleh karena pertimbangan etis dan bijak dari Prof. Dr. Basri Hasanuddin selaku Ketua Dewan Pembina Yapisbar mengangkat Prof. Dr. Muin Liwa, MS sebagai rektor untuk masa jabatan 4 tahun pertama. Sebagai konsekuensinya, kepengurusan Harian Yayasan harus dirubah karena rektor selaku pengelola tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua yayasan yang notabene adalah Badan Hukum Penyelenggara. Seperti diketahui dalam pengurusan Yapisbar Prof. Dr. Muin Liwa adalah ketua sehingga harus diganti. Prof. Dr. Ma'mun Hasanuddin, SH, MH akhirnya bersedia menjadi ketua Yayasan Pendidikan Indonesia

Sulawesi Barat, Dr. Akhsan Jalaluddin sebagai sekretaris dan Prof. Dr. Akbar Tahir sebagai ketua dewan pengawas (Akte Perubahan No 09 Tanggal 31 Desember 2008).

Selanjutnya, dalam berbagai pertemuan diputuskan agar Yapisbar bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Majene sehingga kepengurusan Yapisbar menjadi yayasan semi milik pemerintah daerah. Ini dimaksudkan agar keterlibatan pemerintah dapat memudahkan pembiayaan bagi kebutuhan Universitas Sulawesi Barat yang relatif besar. Setelah melalui pertimbangan matang maka Yapisbar lalu meminta gubernur dan beberapa pejabat Pemprov ikut terlibat didalam yapisbar. Jelasnya sebuah perubahan pengurus harus dilakukan dengan segera. Maka dengan Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA tetap sebagai ketua dewan pembina, dilakukan perubahan pengurus harian dan menunjuk Drs. H. Anwar Adnan Saleh sebagai ketua dan Prof. Dr. Ma'mun Hasanuddin, SH, MH sebagai wakil ketua dan berperan/berfungsi sebagai ketua harian, H. Kalma Katta, S.Sos. MM sebagai wakil ketua, sekretaris dipercayakan kepada Dr. Akhsan Jalaluddin dengan dua wakil yaitu Drs. Ahmad Zamad dan Drs. Abd. Latief Dollah, Saggaf Katta sebagai Bendahara dan Prof. Dr. Akbar Tahir sebagai Ketua Dewan Pengawas (Akte Perubahan No 06 Tanggal 10 November 2009). Hampir semua jajaran kepengurusan yang meliputi anggota dewan pembina dan dewan pengawas adalah dari jajaran pejabat pemerintah provinsi. Kepengurusan Yapisbar inilah yang kemudian menjadi Badan Hukum Penyelenggara Universitas Sulawesi Barat dan berjuang dengan gigih untuk mendapatkan status sebagai Universitas Negeri.

Universitas Sulawesi Barat memperoleh izin operasional melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 229/D/0/2007 tanggal 31 November 2007 yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat di bawah koordinasi Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Lalu bagaimana dengan perjuangan penegerian setelah izin operasional diterima Yapisbar? Setelah Yapisbar menerima izin operasional, maka Yapisbar lalu mengadakan rapat di Jl. Almarkaz Al Islami No. 1. Rapat yang dipimpin langsung oleh Prof. Basri Hasanuddin selaku ketua dewan pembina Yapisbar itu memutuskan penerimaan mahasiswa baru akan dilakukan pada tahun 2008 karena tahun akademik 2007 sudah berlalu. Pada bulan Juli 2008 Dewan pembina mengangkat rektor dengan Surat keputusan No.02-SK/YAPISBAR/VII/2008 pada tanggal 8 Juli tahun 2008 dan melantiknya bersama pembantu rektor dan dekan-dekan pada bulan berikutnya di pendopo rumah jabatan bupati Majene. Inilah awal pengelolaan yang unik karena manajemen operasional dikendalikan dari Makassar. Maklum semua pejabat struktural berdomisili di Makassar. Tetapi dengan segala kelemahan manajerial, proses akademik tetap berlangsung dengan baik.

Sebagai universitas baru, minat mahasiswa sungguh besar dan luar biasa. Sekitar 1.000 calon mahasiswa pada tahun 2008 memenuhi kampus pinjaman dari pemerintah daerah untuk mendaftar, tahun 2009 meningkat menjadi 1.200 dan pada tahun 2010 menghampiri angka 2.000. tetapi pada tahun 2011 mahasiswa yang mendaftar hanya sekitar 180, jelas sesuatu yang tidak menggembirakan dan tidak membanggakan lagi. Apakah gerangan yang telah terjadi? Memerlukan uraian yang panjang sekali untuk mengungkapkannya. Meski mengalami prahara

dan memegang sesuatu telah terjadi, tetapi Yapisbar bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tetap bertekad bahwa upaya penegerian tetap menjadi prioritas dan langkah-langkah sistematis tetap harus dilakukan.

Tahun 2010 adalah tahun dimana separuh perhatian gubernur diberikan kepada Universitas Sulawesi Barat. Salah satu buktinya adalah dengan melakukan *lobby* khusus kepada wakil presiden Budiono untuk melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Barat. Selain untuk melihat langsung proses pembangunan yang tengah berlangsung, juga untuk melibatkan wakil presiden dalam mendukung penegerian Universitas Sulawesi Barat. Seperti kita catat, wapres Budiono akhirnya berkunjung ke Sulawesi Barat dan melakukan rapat terbuka di Majene yang membicarakan tentang pendidikan dan Universitas Sulawesi Barat.

Salah satu pidato wapres pada kunjungan yang bersejarah itu :

“Khusus mengenal Universitas Sulawesi Barat, saya akan perhatikan dan menjadi bagian dari tanggung jawab saya mengantar dan mengawalnya hingga berstatus negeri. Saya berani menjamin penegerian Unsulbar karena ada gubernur Sulbar yang sangat memberi perhatian terhadap pendidikan, apalagi dibelakang program ini ada komitmen kuat dari seorang sahabat dan kolega saya Prof. Dr. Basri Hasanuddin.”

Tentu semua yang hadir mendengar dan merupakan testimoni yang faktual yang tak dapat disangkal. Pada kesempatan itu *fotocopy* sertifikat lahan yang sudah jadi (sekitar 29 ha) diserahkan oleh Rektor Unsulbar Prof. Dr. Muin Liwa kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Satu bulan kemudian wakil presiden Budiono menyurat dengan resmi kepada menteri pendidikan dan kebudayaan, dan proses penegerian pun bergulir dan mengalir. Pada bulan Oktober 2011, sebuah visitasi independen dikirim dari Jakarta untuk mengevaluasi dan mengetahui langsung keadaan Universitas Sulawesi Barat. Dari hasil itu tim percepatan

mengetahui dari Tim independen itu bahwa Universitas Sulawesi Barat sudah layak menjadi negeri dengan beberapa rekomendasi konstruktif. Selama bulan Februari hingga April 2012 kegiatan yang dilakukan adalah validasi semua data, administrasi dan aset Yapisbar, aset pemerintah provinsi dan aset pemerintah kabupaten yang akan diserahkan kepada negara.

Setelah dilakukan berbagai validasi data, maka pada tanggal 30 November 2012, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengirim surat kepada Menteri PAN dan RB No. 123964/MPK/HK/2012 yang mengusulkan agar Universitas Sulawesi Barat diproses lebih lanjut untuk menjadi Universitas Negeri. Pada tanggal 9 Januari 2013 Plt. Deputi Kelembagaan Kementrian PAN dan RB menyampaikan surat undangan kepada gubernur Sulawesi Barat, ketua Yapisbar dan rektor Undulbar dengan No.30/D.II.PAN RB/01/2013, untuk menghadiri rapat lengkap menyangkut penegerian Unsulbar yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2013. Dari rapat itu menghasilkan persetujuan secara aklamasi naskah keputusan dan *draft* peraturan presiden tentang penegerian Unsulbar dan selanjutnya akan dikirim kepada presiden melalui sekretaris kabinet.

Akhirnya pada tanggal 29 Juli 2012 ketua harian Yapisbar Prof. Dr. Ma'mun Hasanuddin, SH. MH, gubernur Sulbar H. Anwar Adnan Saleh dan bupati Majene H. Kalma Katta disaksikan oleh rektor Unsulbar Prof. Muin Liwa menyerahkan seluruh *asset* yang dimiliki meliputi aset fisik bangunan, kendaraan, sarana dan fasilitas, SDM dan lahan sekitar 31 Ha yang sudah bersertifikat. Maka tuntaslah sudah syarat-syarat untuk menjadi Universitas negeri.

Setelah semua syarat-syarat dipenuhi, maka yang ditunggu-tunggu kemudian adalah terbitnya Peraturan Presiden tentang perubahan status Universitas Sulawesi Barat dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri. Tetapi untuk sampai kepada terbitnya Peraturan Presiden tidaklah seperti jalan tol atau jalan dipadang pasir yang tak memiliki rambu-rambu. Diperlukan sejumlah hubungan koneksitas birokrasi antar lembaga yang terkait. Karena menyangkut organisasi dan kelembagaan, maka peranan kementerian PAN dan RB lah yang melakukan koordinasi. Setelah kementerian PAN dan RB dilewati maka bola akan bergulir ke sekretaris kabinet atau sekretaris negara.

Maka ketika sebuah undangan yang ditunjukkan kepada Gubernur, ketua Yapisbar, bupati Majene dan rektor Unsulbar diterima, sayup-sayup terasa sudah ada angin penuh harapan bahwa sebentar lagi angin kebahagiaan akan masuk ke ruang Presiden. Pada rapat yang berlangsung pada tanggal 19 Februari 2013 di lantai II Kementerian PAN dan RB dimana dihadiri oleh wakil dari Kementerian Keuangan, Menko Kesra, Kementerian Dikbud. BKN serta Sekkab disepakati seluruh naskah draft Peraturan Presiden untuk selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Kabinet.

Pada acara yang berlangsung sangat familiar dan penuh suasana bahagia itu sekretaris kabinet Dipo Alam menyerahkan kepada Gubernur Sulawesi Barat. Peraturan presiden No. 26/2013 tentang pendirian Universitas Sulawesi Barat dengan berstatus negeri, disaksikan oleh ketua DPRD Sulawesi Barat; Drs. Hamzah Hapati Hasan, Ketua Harian Yapisbar Prof. Dr. H. Ma'mun Hasanuddin, SH. MH, pejabat rektor Unsulbar Dr. Ir. Akhsan Djalaluddin, asisten I Pemprov

Sulbar Dr. Djamil Barambangi, M. Pd dan sejumlah pejabat sekretaris Kabinet. Peraturan presiden itu kemudian didaftar dalam lembaran negara no. 88/2013. Setelah menjadi PTN maka pada tanggal 19 Desember 2013 Dr. Ir. Akhsan, MS. dilantik menjadi Rektor Universitas Sulawesi Barat dengan Surat Keputusan No. 04/MPK.A4/KP/2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Dimana Unsulbar terdiri dari tujuh fakultas, yaitu :

Tabel 1.3
Daftar Fakultas Universitas Sulawesi Barat

No.	Fakultas	Jurusan
1	Fakultas Pertanian dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Agribisnis • Kehutanan
2	Fakultas Ilmu Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Keperawatan
3	Fakultas Ilmu Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen • Akuntansi
4	Fakultas Teknik	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik Sipil • Teknik Informatika
5	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Matematika • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi • Pendidikan Fisika
6	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Ilmu Politik • Ilmu Hukum • Hubungan Internasional • Pendidikan Bahasa Inggris
7	Fakultas Peternakan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Budi Daya Perairan • Peternakan

5. Lambang Universitas Sulawesi Barat

Gambar 2.2
Logo Universitas Sulawesi Barat



Sumber: logocampus.blogspot.com

6. Visi dan Misi Universitas Sulawesi Barat

- 1) Visi : Menjadi Pusat Unggulan dalam mengembangkan, memelihara, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni untuk memecahkan masalah lokal, nasional, dan global.
- 2) Misi :
 - a) Menyelenggarakan program pendidikan sesuai tuntutan dan kebutuhan pembangunan dalam rangka menghasilkan luaran yang berkualitas, berdedikasi, dan berakhlak mulia
 - b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dalam menjawab tantangan pembangunan
 - c) Memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan kesejahteraan dan peradaban masyarakat

B. Pembahasan Data Hasil Penelitian

1. Penerapan Audit Internal pada Universitas Sulawesi Barat

Audit internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi yang dihasilkan ditujukan untuk manajemen organisasi itu sendiri. Tanggung jawab audit internal berkaitan dengan fungsi audit internal, dengan melakukan kegiatan penilaian yang bebas, dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Kegiatan yang dilakukan dengan menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, audit intern menyediakan jasa tersebut.

Kehadiran audit internal ini sangat membantu dalam penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan audit internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan :

- 1) Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan
- 2) Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi,
- 3) Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti,
- 4) Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi,
- 5) Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan
- 6) Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Hal ini juga dipaparkan oleh Jumardi selaku ketua SPI Universitas Sulawesi

Barat yang menyatakan bahwa :

“Kehadiran audit internal sangat baik. Artinya didalam pengendalian universitas menuju *good university* sangat mendukung dimana berbagai macam kebijakan yang tidak mestinya langsung ditangani langsung oleh pimpinan atas dalam hal ini rektor. Jadi sangat terbantu, seyognyanya SPI berfungsi dimasing-masing universitas terutama didalam melakukan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan baru.” (Wawancara tanggal 3 September 2018)

Demikian juga pernyataan Muh. Yusran selaku dosen di Universitas

Sulawesi Barat sebagai berikut :

“Audit internal merupakan kebutuhan untuk akuntabilitas dalam organisasi. agar sebelum menemukan kendala yang berarti dia harus mengalami proses untuk melihat bagaimana kinerja organisasi dalam kurung waktu tertentu. Jangan sampai kesalahan-kesalahan dalam hal keuangan dan manajerial berakibat fatal, sehingga harus dibenahi sejak dini” (Wawancara tanggal 10 September 2018).

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ridwan selaku LSM yang menyatakan bahwa:

“Kehadiran auditor internal dalam hal ini SPI sangat bagus karena dalam sistem pengawasan internal harus dibutuhkan untuk bagaimana menjamin kelembagaan ini secara baik. Artinya dalam hal apapun itu misalnya agar audit tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran bagaimana manajemen kelembagaan supaya berjalan dengan bagus”(Wawancara tanggal 16 September 2018)

Begitupula pernyataan singkat Darmawansyah selaku mahasiswa Universitas Sulawesi Barat yang menyatakan bahwa:

“ Auditor internal kehadirannya sangat bagus karena dapat membantu perusahaan atau perguruan tinggi dalam sistem keuangannya”(Wawancara tanggal 10 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kehadiran audit internal pada perguruan tinggi khususnya di Universitas Sulawesi Barat sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi serta

dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi. SPI sebagai auditor internal pada perguruan tinggi dan merupakan sumber informasi yang penting bagi auditor eksternal (BPKP) dan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan universitas, karena hasil audit yang berkualitas merupakan sumber informasi penting dalam memberikan keyakinan kepada *stakeholder* dan BPKP.

Relevansi suatu informasi akuntansi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Jika informasi tidak relevan untuk keperluan para pengambil keputusan, tidak ada gunanya walaupun kualitas lainnya terpengaruh. Oleh karena itu, perlu dipilih metode pelaporan akuntansi keuangan yang tepat.

- Dapat diuji
Pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan dan pendapatan yang subjektif. Untuk meningkatkan manfaatnya, informasi keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur metode pengukuran yang sama
- Dapat dimengerti
Informasi yang disajikan harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan pengertian para pemakai
- Netral
Laporan keuangan atau informasi keuangan diarahkan pada kepentingan umum dan tidak bergantung pada kebutuhan pihak tertentu.

- Tepat waktu

Informasi hendaknya diberikan sedini mungkin agar menjadi sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi

- Daya banding

Informasi dalam laporan keuangan sebelumnya dari perusahaan yang sama ataupun dengan laporan keuangan perusahaan sejenis pada periode yang sama

- Lengkap

Informasi keuangan lengkap jika memenuhi enam tujuan kualitatif diatas dan dapat memenuhi standar pengungkapan laporan keuangan.

Lebih lanjut, dalam menjalankan tugas auditor internal harus mengacu pada Standar Auditor Internal. Standar tersebut dikeluarkan oleh *Institute of Internal Audit* (IIA) atau dikenal dengan *Professional Practices Framework* (PPF) yang meliputi Standar Profesional Audit (SPAI). Peran audit internal diperlukan, karena audit internal suatu bagian yang independen yang disiapkan dalam perusahaan untuk menjalankan fungsi pemeriksaan, pengendalian dan keberadaan audit internal ditunjukkan untuk memperbaiki kinerja perguruan tinggi tersebut.

Perihal penerapan audit internal di Universitas Sulawesi Barat, Jumardi selaku ketua SPI Universitas Sulawesi Barat mengungkapkan bahwa :

“Penerapan audit internal ini belum maksimal tapi menuju kemaksimal karena kita masih PTNB dan kita ini bukan auditor terlatih. Kita hanya dibekali pelatihan-pelatihan untuk mengaudit seperti dasar-dasar untuk mengaudit, pemeriksaan dan *review*”(Wawancara pada tanggal 3 September 2018).

Lebih lanjut, beliau memaparkan :

“Tentu ada kendala selama saya berprofesi sebagai auditor internal yaitu jika pihak SPI meminta data kadang tidak diberikan dan ketika memberikan saran kadang saran tersebut tidak didengarkan. Tapi selama niat kita untuk memperbaiki universitas, itu tidak menjadi masalah yang serius” ”(Wawancara pada tanggal 3 September 2018).

Beliau juga menambahkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan auditor mengalami masalah :

“Mengenai faktor-faktor permasalahan ada tiga kendala yaitu sedang, ringan dan berat. Dimana ringannya itu adalah masih mempunyai SDM yang belum posisinya sebagai auditor. Contohnya kita sebagai dosen namun diberikan tugas bantuan sebagai tim pemeriksaan. Kendala sedangnya adalah dibagian aggarannya, dimana kadang kita ingin menambahkan SDM tapi anggarannya sangat minim apalagi kita sebagai PTNB. Dan kendala beratnya adalah ketika ada temuan yang ditemukan oleh audit eksternal tapi audit internal tidak menemuikan sehingga audit internal harus bekerja keras dimana titik kesalahan atau temuan tersebut” ”(Wawancara pada tanggal 3 September 2018).

Muh. Yusran selaku Dosen Universitas Sulawesi Barat juga mengungkapkan bahwa :

“Audit internal dalam hal ini SPI baru efektif karena tidak berbarengan berdirinya Unsulbar secara keorganisasian dan kelembagaan. Tentu memang harus ada perbaikan dari sisi tata keorganisasian maupun sisi profesionalisme dan kompetensi anggotanya. Dari sisi praktik saya tidak bisa memberikan informasi yang banyak”(Wawancara pada tanggal 10 September 2018)

Lebih lanjut, beliau juga menambahkan bahwa :

“Auditor itu harus profesional, akuntabel dan independen. Secara normatif jika itu dijalankan dan berpegang teguh pada etika dan integritasnya pasti akan berjalan baik kegiatan auditnya itu”(wawancara pada tanggal 10 September 2018)

Saat dikonfirmasi oleh Darmawansyah selaku mahasiswa Universitas Sulawesi

Brarat mengenai penerapan audit internal, ia mengungkapkan:

“Penerapan audit internal belum berjalan dengan baik, karena melihat apa yang terjadi di kampus sekarang masih banyak masalah-masalah yang belum teratasi”(Wawancara pada tanggal 10 September 2018)

Dia juga menambahkan mengenai dampak yang terjadi pada mahasiswa:

“Tentu saja ini sangat berdampak bagi kami selaku mahasiswa, seperti yang terjadi karena tidak adanya ketidaktransparansian dalam pengelolaan anggaran sehingga dosen disini mogok mengajar dan kami sebagai mahasiswa tidak mendapat pelajaran yang seharusnya”(Wawancara pada tanggal 10 September 2018)

Sejalan dengan pernyataan tersebutm Ridwan selaku LSM juga mengungkapkan

tentang penerapan audit internal bahwa :

“Belum berjalan dengan maksimal, terbukti dengan banyaknya masalah, misalnya dalam hal perencanaan keuangan. Contoh yang sekarang terjadi adanya bias-bias di Unsulbar ini mengenai masalah penggajian. Ini menandakan perencanaan di Unsulbar tidak berjalan, begitupula dengan SPInya tidak berjalan untuk memaksimalkan persoalan ini. Begitu juga dalam hal kepegawaian dalam hal ini tidak terlalu teratur, terbukti banyaknya pegawai-pegawai baru dan itu tidak sejalan dengan perencanaannya terutama pada masalah keuangannya dalam hal ini penggajian masih belum maksimal dan masih perlu dimaksimalkan”(Wawancara pada tanggal 16 September 2018).

Lebih lanjut, beliau megungkapkan dampak yang akan terjadi pada tata kelola

kampus :

“Dampaknya sangat jelas yaitu adanya sistem perencanaan yang kacau balau, administrasi yang tidak teratur dan tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan-penyimpangan sebab ini dapat membuka celah karena SPI tidak berjalan dengan semestinya”(Wawancara pda tanggal 16 September 2018).

Menanggapi persoalan tersebut, peneliti mengonfirmasi kepada Misbah

Sabaruddin selaku Pimpinan Redaksi Media Kampus mengenai penerapan audit

internal di Universitas Sulawesi Barat:

“Saya belum pernah berinteraksi langsung dengan SPI namun SPI pasti mempunyai peran tersendiri selain sebagai pengawas internal kampus dan memang kampus sangat perlu auditor internal dalam hal ini SPI dan bila perlu SPI rutin mengecek dan mengawal dengan baik anggaran yang keluar masuk”(Wawancara pda tanggal 9 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan audit internal di Universitas Sulawesi Barat belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan Universitas Sulawesi Barat ini masih PTNB dan juga SDM yang dimiliki sangat kurang serta tidak terlalu berkompetensi dibidangnya, mereka hanya sekedar diberi pelatihan-pelatiha dasar. Hal ini menyebabkan terjadinya banyak kendala-kendala yang ditemui dan juga adanya permasalahan yang terjadi yang menyebabkan tata kelola kampus dan mahasiswa menjadi imbasnya. Ruang lingkup dari pekerjaan internal audit oleh SPI yang terdapat didalam standar profesi akuntan internal yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal yaitu “fungsi audit intern melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan *governance* dengan pendekatan yang sistematis, teratur dan meyeluruh”. Sehingga maksud dari pengertian ini adalah pihak SPI membantu instansi dalam hal identifikasi risiko yang dimiliki instansi, kemudian memfokuskan diri pada risiko tersebut agar dapat meningkatkan pengelolaan risiko tersebut dan melakukan pengendalian internal.

2. Pelaksanaan Good University Governance Pada Universitas Sulawesi

Barat

Ditengah persaingan yang cukup berat, peningkatan mutu menjadi hal yang tidak terhindarkan agar dapat bersaing mendapat kepercayaan masyarakat

dan tetap eksis. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. *Good university governance* adalah suatu sistem tata kelola universitas yang baik dengan menganut prinsip *good university governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, *equity*, dsb. Dalam implementasinya, prinsip-prinsip atau karakteristik dasar dari *good governance* masih relevan untuk diterapkan dalam konsep *good university governance*. Yang berbeda adalah nilai dan tujuan yang menjiwaanya. Prinsip-prinsip manajerial tersebut hendaknya diterapkan untuk mendukung fungsi-fungsi dan tujuan dasar pendidikan tinggi. Selain itu, perbedaan lain adalah dalam hal *stakeholders* yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan perguruan tinggi.

Lebih lanjut, peneliti berinisiatif menanyakan mengenai kehadiran konsep *good university governance* pada informan. Seperti tanggapan Jumardi selaku ketua SPI di Universitas Sulawesi Barat sebagai berikut :

“Sangat bagus karena ini berdasarkan kemenristekdikti bahwasanya kita bisa menjadi universitas dimana dapat memberikan pelayanan terdepan”(Wawancara pada tanggal 3 September 2018)

Darmansyah selaku mahasiswa Universitas Sulawesi Barat juga memberi tanggapan mengenai adanya konsep *good university governance* ini sebagai berikut :

“Sangat baik karena *good university governance* ini dapat meningkatkan budaya mutu pelayanan akademik maupun non akademik untuk perguruan tinggi tersebut”(Wawancara pada tanggal 10 September 2018).

Tanggapan positif juga datang dari Ridwan selaku LSM mengenai konsep *good university governance* ini :

“Saya sangat mendukung sebab sudah jelas konsep-konsep transparansi dan akuntabilitas sangat bagus. Bagaimana dikampus tersebut adanya transparansi dalam hal kepegawaian, akademik, begitupun dengan keuangan. Ini sangat jelas sangat bagus dan dapat menutup celah adanya penyimpangan-penyimpangan”(Wawancara pada tanggal 16 September 2018).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya konsep *good university governance* dapat memberikan pelayanan terdepan baik dari segi akademik maupun non akademik dan juga dapat menutup celah adanya penyimpangan-penyimpangan. *Good university governance* dianggap sebagai elemen penting perguruan tinggi untuk dapat mengantisipasi, melaksanakan, memantau dan menilai efektifitas dan efesiensi kebijakan. Tujuan *good university governance* adalah untuk mengakomodasi internasionalisasi perguruan tinggi, meningkatkan daya saing, kualitas proses pembelajaran, kualitas manajemen internal dan untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Muktiyanto, 2016).

Dasar pemikiran tentang kebutuhan pelaksanaan *good governance* diperguruan tinggi adalah pertama; karena adanya kehendak dari perguruan tinggi dapat menggunakan otonomi yang diberikan secara baik, kedua; penerapan *good university governance* diperguruan tinggi yang sejalan dengan filosofi *new public management* (NPM), ketiga; dengan penerapan *good university governance* diperguruan tinggi diharapkan dapat melindungi institusi dari penipuan/kesalahan pengelolaan organisasi oleh para pemegang hak otonomi/pengelola.

Keberhasilan dalam pelaksanaan *good university governance* tidak akan terlaksana dengan sendirinya tanpa upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Pengelolaan perguruan tinggi yang baik (*good university governance*) sudah semestinya menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Terlebih dengan melihat kontribusi yang diberikan oleh perguruan tinggi. Akuntabilitas menjadi salah satu unsur pokok dalam mewujudkan *good university governance*. Laporan pertanggungjawaban adalah salah satu bentuk akuntabilitas dalam mewujudkan *good university governance* atau tata kelola perguruan tinggi yang baik. Namun, akuntabilitas yang ada di Universitas Sulawesi Barat nyatanya belum terlaksana dengan baik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Darmawansyah selaku mahasiswa yang menyatakan bahwa :

“Mengenai akuntabilitas di Universitas Sulawesi Barat itu sendiri, saya melihat bentuk pertanggungjawabannya belum maksimal dalam artian kembali lagi kita melihat masih banyak masalah-masalah yang belum bisa terartasi dikampus tercinta ini”(Wawancara pada tanggal 10 September 2018)

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Ridwan selaku LSM mengenai hal tersebut yang menyatakan bahwa :

“Saya tidak terlalu faham tentang apa yang mereka lakukan di SPI sampai hari ini. Maksudnya, apakah mereka sudah melakukan sesuai dengan juknis yang diberikan oleh tata laksana SPI itu sendiri tapi yang jelas kita bisa lihat fakta yang terjadi banyaknya bias-bias di Unsulbar ini. Tapi saya yakin bahwa mereka sudah sebenarnya menjalankan tugas, hanya persoalannya masih belum maksimal dan inilah yang perlu menjadi acuan mereka bagaimana orang-orang yang terlibat didalam SPI ini adalah orang-orang yang akuntabel dan mereka harus mempunyai kompetensi dibidangnya. Bukan hanya mereka mencari orang karena faktor kedekatan atau faktor yang lain sehingga mereka ada didalamnya. Karena SPI itu harus betul-betul independen”(Wawancara pada tanggal 16 September 2018).

Pernyataan diatas mengindikasi bahwa akuntabilitas bukan hanya masalah laporan pertanggungjawaban tetapi bagaimana orang-orang didalamnya adalah orang yang akuntabel serta harus memiliki sikap yang independen. Tujuan akuntabilitas hendaklah menegaskan bahwa akuntabilitas bukanlah akhir dari sistem penyelenggaraan manajemen manajemen, tetapi merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi lagi. Bahkan, boleh dikatakan bahwa akuntabilitas baru sebagai titik awal menuju keberlangsungan perguruan tinggi yang baik. Perihal pelaksanaan *good university governance* di Universitas Sulawesi Barat, Jumardi selaku ketua SPI secara singkat mengungkapkan :

“Pelaksanaan konsep *good university governance* ini belum secara maksimal walaupun visi misi mewujudkan perguruan tinggi yang baik”(Wawancara pada tanggal 3 September 2018).

Terlepas dari pernyataan informan diatas, Darmansyah selaku mahasiswa Universitas Sulawesi Barat juga mengungkap :

“ Pelaksanaan *good university governance* belum berjalan dengan baik. ini dilihat dari adanya ketidak relevan dengan prinsip *good university governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas”(Wawancara pada tanggal 10 September 2018)

Melihat tanggapan yang diberikan oleh beberapa informan mengenai akuntabilitas serta tata kelola perguruan tinggi Unsulbar saat ini, peneliti mengonfirmasi kepada Misbah Sabaruddin selaku Pimpinan Redaksi Media Kampus Universitas Sulawesi Barat sebagai berikut :

“Penerapannya belum terlaksana dengan baik, karena belajar dari peristiwa yang terjadi kemarin saat kami melakukan peliputan lapangan mahasiswa mempertanyakan anggaran kampus dan juga mereka mengeluhkan bahwa UKT yang mereka bayarkan tidak sesuai dengan fasilitas yang dia dapatkan. Jadi, kalau saya melihat dari sudut pandang

media, konsep *good university governance* ini belum diterapkan dengan baik.”(Wawancara pada tanggal 9 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditambah penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *good university governance* dapat memberikan pelayanan terdepan namun pelaksanaan *good university governance* di Universitas Sulawesi Barat ini belum terlaksana dengan maksimal ini dibuktikan dari pernyataan informan bahwa adanya ketidak relevanannya prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini memicu timbulnya bias-bias yang terjadi, namun diharapkan ini bisa menjadi acuan mereka bagaimana orang-orang yang terlibat didalamnya adalah orang yang akuntabel dan berkompeten dibidangnya sehingga prinsip *good university governance* terkhusus dalam hal transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai dan membawa Universitas Sulawesi Barat menjadi salah satu perguruan tinggi yang mempunyai tata kelola yang baik.

3. Peran Auditor Internal Dalam Upaya Mewujudkan Good University

Governance pada Universitas Sulawesi Barat

Konsepsi pendidikan tinggi di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, memberikan otonomi kepada perguruan tinggi sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi negeri (PTN) mempunyai otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya. Otonomi dimaksud: 1) otonomi dibidang akademik, meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat; dan 2) otonomi dibidang non akademik, meliputi penetapan norma

dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagakerjaan dan sarana prasarana. Otonomi non-akademik (pengelolaan) untuk meningkatkan mutu pendidikan dilaksanakan melalui prinsip *good university governance* (Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014).

Prinsip tata kelola transparansi, akuntabel, tanggungjawab, efesiensi, adil dan *reward-punishment* sudah merupaka suatu keharusan untuk ditegakkan diperguruan tinggi. Dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha Perguruan Tinggi, pengelola perlu menerapkan konsep *good governance* dalam pengelolaan perguruan tinggi yang dikenal dengan *good university governance* (GUG). Audit internal merupakan salah satu profesi yang menunjang terwujudnya *good university governance*. Peran audit internal dalam hal ini satuan pengawas internal harus lebih diberdayakan baik secara internal (manajemen) maupun eksternal (*stakeholder*) agar mempunyai kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan *good uniiversity governance* tersebut. Makin meningkat peran auditor, maka akan memengaruhi peningkatan tata kelola suatu instansi pendidikan.

Dalam perkembangannya, informasi yang diberikan oleh auditor internal selain berguna bagi para pemangku kepentingan didalam organisasi itu sendiri juga dibutuhkan oleh pihak luar perusahaan. Pada faktanya tidak menutup kemungkinan memanfaatkan kedekatan personal dengan seorang auditor internal. Berdasarkan teori keagenan yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dengan para pemegang saham (*stakeholder*), dan konflik tersebut menjadi pemicu perhatian manajemen. Dalam kaitannya dengan SPI, teori ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara

stakeholder membuat pentingnya satuan pengawas internal di Universitas Sulawesi Barat. Kecenderungan dari pihak manajemen Universitas Sulawesi Barat yang menginginkan keuntungan pribadi, akan membuat dana yang diperoleh dari pemerintah mudah disalahgunakan. Oleh karena itu diperlukan peran dari Satuan Pengawas Internal dengan tujuan ketika hendak mengambil tindakan dapat maksimal tanpa ada kecanggungan. Dengan demikian seorang auditor internal harus mempunyai profesionalisme dalam bekerja, sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain, karena seorang auditor dituntut untuk bersikap profesional serta menjunjung tinggi kode etik.

Berikut ini adalah aktivitas pemeriksaan intern dan merupakan peran dari auditor internal dalam suatu perusahaan atau organisasi :

a. *Compliance*

Aktivitas ini untuk menilai sampai sejauh mana tingkat kepatuhan para pegawai terhadap kebijaksanaan, prosedur peraturan-peraturan dan praktek usaha yang lazim, serta undang-undang dan peraturan pemerintah yang mempunyai aturan.

b. *Verifikasi*

Kegiatan *verifikasi* difokuskan pada ketelitian, keandalan berbagai data manajemen dan evaluasi apakah data tersebut relevan serta memenuhi kebutuhan manajemen yang meliputi laporan keuangan dan kekayaan fisik serta hasil operasi perusahaan

c. Evaluasi

Aktivitas ini memiliki bentuk pengendalian intern yang ditetapkan perusahaan dan meliputi penilaian terhadap pengendalian akuntansi dan operasi, juga menilai hasil-hasil pelaksanaan dan petugas pelaksanaannya.

d. Merekomendasi

Merekomendasi suatu rangkaian tindakan kepada pihak manajemen.

Pengawasan juga merupakan salah satu fungsi penting dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan tanpa pengawasan, fungsi yang lain tidak akan berjalan secara efisien, efektif dan maksimal. Berdasarkan teori pengawasan yang mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Satuan pengawas internal yang dibentuk sebagai auditor internal diharapkan mampu berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik. Apabila peran pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal berjalan seperti yang diharapkan, maka kolusi, korupsi dan nepotisme pada pelaksanaan tata kelola perguruan tinggi akan bisa ditekan, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana kampus tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam Al-Qur'an Surah Az-Zumar ayat 39, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

قُلْ يٰٓقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَمِلْتُ فَاَسُوۡفَ تَعْلَمُوۡنَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya: “Katakanlah: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui”. (Q.S Az-Zumar ayat 39)

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada umat islam agar melakukan pekerjaan sesuai dengan keadaannya, dan kelak akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Auditor internal yang dibentuk sebagai Satuan Pengawasan Intern perguruan tinggi haruslah bekerja sesuai dengan tugas yang di amanahkan kepadanya, dan mampu menjalankan tugas tersebut dengan sebaik mungkin, khususnya dalam hal pengawasan dalam menunjang perguruan tinggi yang baik dan kelak mendapat rahmat dan berkah dari Allah SWT .

Auditor internal dalam hal ini SPI (satuan pengawas internal) dibentuk dan harus berperan aktif dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan internal di lingkungan universitas untuk menunjang tata kelola perguruan tinggi yang baik.. Ketika dikonfirmasi terkait peran audit internal dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), Jumardi selaku ketua SPI Universitas Sulawesi Barat menyatakan bahwa :

“Saya selalu berfikir bagaimana PTN ini bisa selevel dengan PTN yang sudah mapan, karena kita masih PTNB bagaimana supaya kita bisa beralih dari PTNB menjadi BLU atau PTNBH” (Wawancara pada tanggal 3 September 2018)

Dari pernyataan diatas, bisa dilihat bahwa Jumardi selaku auditor internal terus berusaha bagaimana supaya Universitas Sulawesi Barat mempunyai tata kelola yang baik. Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Muh. Yusran selaku Dosen Universitas Sulawesi Barat sebagai berikut :

“Secara kelembagaan harus diakui unsulbar adalah PTNB. Dia merupakan peralihan dari pengelolaan model swasta ke model negeri. Pasti penyesuaian itu terdapat masalah tapi didalam organisasi perlu waktu untuk membenahi dirinya, sehingga dapat dilihat peran SPI kedepan bagaimana dia memposisikan diri sebagai tim pengendali yang mengendalikan semua kinerja-kinerja organisasi baik kinerja operasional maupun kinerja keuangan agar Universitas Sulawesi Barat ini dapat mencapai apa yang dicita-citakan sesuai visi dan misinya” (Wawancara pada tanggal 10 September 2018)

Muh Yusran menambahkan pula bahwa :

“Berdasarkan visi misi yang dirumuskannya, tentu didalamnya auditor internal berfungsi sebagai pengendali, pengontrol dan evaluator, baik yang sifatnya kinerja operasional dan kinerja keuangannya. Jika semua syarat sudah dipenuhi sistem itu bisa bekerja dengan baik, artinya tim evaluasi bekerja maupun yang ingin dievaluasi ada keterbukaan memberikan informasi ataupun profesional dalam bekerja, semuanya terevaluasi dengan akuntabel dan akan terungkap hal-hal yang perlu terungkap sehingga setiap institusi dalam hal ini Universitas tentu bisa dievaluasi bagaimana kinerja organisasinya” (Wawancara pada tanggal 10 September 2018)

Darmawansyah sebagai mahasiswa Universitas Sulawesi Barat juga memberi tanggapannya mengenai hal tersebut :

“Peran audit internal ini sangatlah penting apalagi dalam hal perbaikan tata kelola perguruan tinggi yang baik. Jadi menurut saya selaku mahasiswa untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik harus dimulai dengan perbaikan akuntabilitas serta transparansi itu sendiri sehingga kepercayaan masyarakat juga akan bertambah apabila hal tersebut bisa berjalan”(Wawancara pada tanggal 10 September 2018)

Sedangkan Ridwan selaku LSM mengungkapkan bahwa :

“Secara bagusnyaseharusnya mereka berjalan sampai tidak akan ada riak-riak, kalau SPI berjalan dengan baik pasti tidak akan ada riak-riak tapi pada saat tidak berjalan dengan baik pasti akan ada riak-riak dan ini menandakan adanya tata kelola yang tidak bagus”(Wawancara pada tanggal 16 September 2018)

Lebih lanjut, dengan nada serius beliau memaparkan :

“Dan berbicara tentang adanya celah-celah, seandainya SPI sudah berjalan dengan semestinya pada saat perencanaan. Contoh masalah

kepegawaian yang sudah jelas terarah. Setiap tahun misalnya sekian kita punya pegawai, ini tidak boleh bertambah dan harus jelas dan terencana. Jadi peran audit internal ini sangat penting dan harus jelas bagaimana dia mengaudit keuangan, kepegawaian, bagaimana administrasi dan bagaimana administrasi kampus”(Wawancara pada tanggal 16 September 2018)

Namun, dibalik semua pernyataan tersebut, beliau menaruh harapan besar kepada Universitas Sulawesi Barat sebagai berikut :

“Unsulbar ini sangat luar biasa, Unsulbar ini adalah salah satu universitas negeri yang baru yang dimana mata masyarakat menuju ke kita dalam hal ini Universitas Sulawesi Barat bagaimana membangun SDM yang bagus. Harapan saya agar SPI harus berjalan dengan efektif, berjalan dengan maksimal. Yang kedua orang-orang yang masuk kedalam SPI itu adalah orang yang mempunyai kompetensi dan mempunyai integritas yang bagus. Jangan hanya memikirkan kepentingan individu, karena disini bagaimana kita membangun universitas kearah yang lebih bagus setara dengan Universitas Hasanuddin, UGM, Universitas Indonesia, dll ”(Wawancara pada tanggal 16 September 2018)

Peneliti juga menanyakan bagaimana peran audit internal dalam upaya mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik kepada Misbah Sabaruddin, beliau menanggapi bahwa :

“Kembali lagi pada tujuan dibentuknya SPI ini untuk apa, pasti untuk betul-betul sebagai pengawas kampus. Yah kembali lagi pada fitrahnya itu sendiri, kalau SPI betul-betul berkomitmen untuk mengawal masalah-masalah internal kampus terutama dalam pengelolaan anggaran, saya kira kampus manapun pasti akan bisa mencapai tata kelola yang baik. intinya SPI harus berkomitmen pada tanggungjawab dan juga rasa sosial mereka untuk memajukan universitas”(Wawancara pada tanggal 9 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa peran audit internal dalam upaya mewujudkan *good university governance* di Universitas Sulawesi Barat secara teknis belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini dikarenakan Universitas Sulawesi Barat yang merupakan PTNB masih dalam tahap penyesuaian untuk membenahi dirinya. Untuk itu peran audit internal ini

sangat dibutuhkan dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik. Namun perlu digaris bawahi bahwa SPI bukan hanya sekedar nama didalam universitas tersebut tetapi bagaimana SPI harus bisa menjaga independensi dalam sikap mentalnya dan juga menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa diharapkan orang-orang yang terlibat didalamnya adalah orang yang akuntabel dan berkompeten dibidangnya sehingga prinsip *good university governance* terkhusus dalam hal transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai dan membawa Universitas Sulawesi Barat menjadi salah satu perguruan tinggi yang mempunyai tata kelola yang baik serta dapat membangun kepercayaan masyarakat bahwa Universitas Sulawesi Barat ini bisa menjadi perguruan tinggi yang bisa diperhitungkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kehadiran audit internal pada perguruan tinggi khususnya di Universitas Sulawesi Barat sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi serta dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi. Akan tetapi, penerapan audit internal di Universitas Sulawesi Barat belum berjalan dengan maksimal sehingga banyaknya kendala yang ditemui serta berdampak pada tata kelola kampus. Hal ini dikarenakan Universitas Sulawesi Barat masih dalam kategori perguruan tinggi negeri baru (PTNB) dan SDM yang dimiliki sangat kurang serta tidak berkompeten dibidangnya.
2. Konsep *good university governance* dapat memberikan pelayanan terdepan baik dari segi akademik maupun non akademik dan juga dapat menutup celah adanya penyimpangan-penyimpangan, namun pelaksanaan *good university governance* di Universitas Sulawesi Barat belum terlaksana dengan maksimal karena adanya ketidak relevan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal inilah yang memicu timbulnya bias-bias yang terjadi.

3. Peran audit internal dalam upaya mewujudkan *good university governance* di Universitas Sulawesi Barat secara teknis belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini dikarenakan Universitas Sulawesi Barat yang merupakan PTNB masih dalam tahap penyesuaian untuk membenahi dirinya. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa SPI bukan hanya sekedar nama didalam universitas tersebut tetapi bagaimana SPI harus bisa menjaga independensi dalam sikap mentalnya dan juga menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama serta orang-orang yang terlibat didalamnya orang yang akuntabel dan berkompeten dibidangnya.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian yang diajukan peneliti berupa masukan atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan dimasa mendatang, antara lain:

1. Diharapkan audit internal dalam hal ini Satuan Pengawas Internal (SPI) dapat memaksimalkan penerapan audit internal di Universitas Sulawesi Barat agar kedepannya audit yang dilakukan dapat efektif serta dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi.
2. Peran audit internal diharapkan mampu mewujudkan *good university governance* di Universitas Sulawesi Barat meskipun universitas ini masih tergolong perguruan tinggi negeri yang baru dan juga sebagai upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta dapat membangun kepercayaan masyarakat bahwa Universitas Sulawesi Barat ini bisa menjadi perguruan tinggi yang bisa diperhitungkan.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, berikut adalah saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memudahkan audit internal dalam mewujudkan *good university governance* di Universitas Sulawesi Barat, sehingga berdampak baik dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada tata kelola di Universitas Sulawesi Barat, yaitu:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki dengan adanya penambahan auditor yang profesional dibidangnya dan diadakannya pelatihan-pelatihan secara berkala mengenai peran auditor internal dan diikuti oleh seluruh auditor.
2. Meningkatkan tata kelola perguruan tinggi yang lebih baik lagi dimana harus dimulai dari perbaikan akuntabilitas dan transparansi itu sendiri. Serta mengkoordinasikan ketersediaan SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi SPI di Universitas Sulawesi Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Abd Jabar. 2016. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan IAIN Menuju Iain Ambon Bermutu Melalui Pelaksanaan Good University Governance. *Jurnal Fikratuna*. 8(2): 22-34.
- Al-Bukhori, Sudirman. 2018. *Penggunaan Anggaran UnSulbar Dipertanyakan*. <https://mamujupos.com/penggunaan-anggaran-unsulbar-dipertanyakan/>. Diakses tanggal 13 Maret 2018.
- Anggriawan, E. Ferry. 2014. Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional Dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi *Fraud* (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di DIY). *Jurnal Nominal*. 3(2): 102-116.
- Anton, FX. 2010. Menuju Teori *Stewardship* Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*. 1(2): 61-80.
- Ardi, Lamadi. 2013. <http://ardi-lamadi.blogspot.com/2013/08/logo-kabupaten-majene.html>. Diakses Tanggal 19 Maret 2018.
- Ardianto, Yudhi. 2012. Evaluasi efektifitas satuan pengawas intern (Studi pada perusahaan BUMN). *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. 1(3): 118-121.
- Aurangzeb, Asif, K. (2012). Good governance in universities, and prospects of employment for the students: evidence from Pakistan. *Universal Journal of Management and Social Sciences*. 2(11): 86-103.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2017. *Koordinasi untuk Perbaikan Tata Kelola Universitas Sulawesi Barat*. <http://www.bpkp.go.id/sulbar/berita/read/18648/0/Koordinasi-untuk-Perbaikan-Tata-Kelola-Universitas-Sulawesi-Barat.bpkp>. Diakses tanggal 15 Juli 2018.
- COSO. 2013. Internal Control — Integrated Framework. *Executive Summary*. 1(1): 1-10.
- Darmawati., Deni, Khomsiyah dan Rika G. Rahayu. 2004. Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi VII*.
- Fama, E. F., & Jansen, M. C. 1983. Agency Problems and Residual Claims. *Journal of Law and Economics*. 26(2): 1-20.

- Gusnardi. 2008. Analisis Audit Internal dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Ekuitas*. 12(3): 1-20.
- Halim, Abdul. 2008. *Dasar-Dasar Prosedur Pengauditan Laporan Keuangan*, Edisi Empat, UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Handayani, Desi. 2012. Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. 5(1): 12-16.
- Kholidah, Nur. 2015. *Audit Dalam Perspektif Islam*. <https://www.kompasiana.com/nurkholidah/audit-dalam-perspektif-islam/>. Diakses tanggal 08 Juni 2018.
- Kuntadi, Cris. 2009. Peningkatan Kapasitas Audit Internal Dalam pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan. *Majalah Dwiwulan BPK-RI No. 119*.
- Kusuma, Marhaendra. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan laporan Keuangan pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2(2): 1-20.
- Kuswarno, Engkus, 2009. *Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian*. Widya Padjadjaran : Bandung.
- Maryono. 2014. Penerapan Good University Governance Pada PTAI Berbasis Pesantren (Studi Kasus di Universitas Sains Al-Qur'an (Unsiq) Wonosobo). *Jurnal Al-Qalam*. 13(2): 180-191.
- Mihela, Dumitrascu dan S. Julian. 2012. Internal Control and the Impact on Corporate Governance, in Romanian Listed Companies. *Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics*. 20(2): 1-10.
- Muktiyanto, Ali. 2016. Good University Governance dan Kinerja Perguruan Tinggi. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. 2(3): 45-65.
- Muljo, H. Harjono., A. Wicaksono dan I. E. Rianto. 2014. Optimalisasi Penerapan Prinsip Good Governance Bidang Akademik Dalam Upaya Mewujudkan Good University Governance. *Binus Business Review*. 5(1): 91-100.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Edisi Enam, Buku Satu, Salemba Empat: Jakarta.
- Nurhayati. 2015. Melukiskan Akuntansi Dengan Kuas Interpretif. *Jurnal Bisnis*. 3(1): 174- 191.

- Nurkhalisa. 2017. *Demo Mahasiswa Unsulbar Sampaikan Tujuh Tuntutan*.
<http://karakterunsulbar.com/2017/12/20/demo-mahasiswa-unsulbar-sampaikan-tujuh-tuntutan/>. Diakses Tanggal 13 Maret 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 60 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Pratiwi, R. Octava. 2012. Evaluasi efektivitas fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam melaksanakan Audit Internal. *Jurnal Akuntansi UNESA*.5(2): 1-18.
- Puspitarini, N. Dyah. 2012. Peran Satuan Pengawasan Intern Dalam Pencapaian Good University Governance Pada Perguruan Tinggi Berstatus Pk-Blu. *Accounting Analysis Journal*. 1(2): 1-7.
- Puspitarini, N. Dyah., Sukirman dan I. Anisykurlillah. 2013 Peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam Pencapaian Good University Governance (GUG) pada perguruan tinggi Se-Jawa yang Berstatus Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-LBU). *Symposium Seminar Akuntansi (SNA) Manado*. Hal: 1-25.
- Rosyid, Ahmad., A. Fakhrina dan M. Huda. 2014. Survei Atas Implementasi Good University Governance (Studi Kasus STAIN Pekalongan). *Jurnal Penelitian*. 11(1): 172-188.
- Rustiarini, Ni Wayan. 2010. Pengaruh *Corporate Governance* pada Hubungan *Corporate Social Responsibility* dan Nilai Perusahaan. *Symposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Saptapradipta, P. 2013. Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pelaksanaan Good Governance. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53(9): 1689-1699
- Sari, C. M. A. dan R. Rustiana. 2016. Pemetaan Penerapan Standar Audit Berbasis ISA Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *MODUS-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 28 (1):23-38.
- Sari, M. P., & Raharja. 2012. Peran Audit Internal Dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia. In *Symposium Nasional Akuntansi 15*. Hal:1-65

- Sawyer, Lawrence B. 2005, *Audit Internal*, Edisi Lima, Buku Satu, Salemba Empat: Jakarta.
- Siswanto, Ely, Djumahir, Sonhadji, A., Idrus, M. S. 2013. Good university income generating governance in Indonesia: agency theory perspective. *International Journal of Learning & Development*, 3(1): 67-78.
- Soh, Dominic S. B., dan Nonna Martinov-Bennie. 2011. The Internal Audit Function: Perceptions of Internal Audit Roles, Effectiveness and Evaluation. *Managerial Auditing Journal*. 26(7): 605-622.
- Sukirman & M.P. Sari. 2012. Peran internal audit dalam upaya mewujudkan Good University Governance di UNNES. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 4(1): 64-71.
- Sundari, Sri. 2010. Peran Akuntan Manajemen dalam Pengukuran dan Implementasi Strategi Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. 1(1): 1-10.
- Trisnaningsih, Sri. 2007. Independensi Auditor Dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman *Good Governance*, Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. *Symposium Nasional Akuntansi X*. Hal: 1-56.
- Tugiman, Hiro. 1997. Standar Profesional Auditor Internal.. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Valery, Kumaat G. 2011. *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Wahab, A. Azis dan S. Rahayu. 2013. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good University Governance* Terhadap Citra Serta Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing Perguruan Tinggi Negeri Pasca Perubahan Status Menjadi BHMN (Survei Pada Tiga Perguruan Tinggi Negeri Berstatus BHMN Di Jawa Barat). *Jurnal Administrasi Pendidikan*. 16(1): 154-173.
- Wijatno, S. 2009. Pengantar *Entrepreneurship*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Wijatno, Serian. 2009. *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif dan Ekonomis Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan*. Salemba Empat : Jakarta.

- Wina, I. P. Haska dan S. Khairani. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dispenda Provinsi, Dispenda Kota, dan DisHub Provinsi). *Jurnal Penelitian*. 1(1): 1-15.
- Wolfenshon, James. D. 1999. *Good Corporate Governance, Pengertian dan Konsep Dasar*. World Bank.
- Yudianti, F. N. dan Suryandari, I. H. 2015. Internal Control and Risk Management in Ensuring Good University Governance. *Journal of Education and Vocational Research*. 6(2): 6-12.



L

A

M

P

I

R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

N

Hasil Wawancara Informan 1

Nama : Jumardi, SE, M. Si
Jabatan : Ketua SPI Universitas Sulawesi Barat
Tanggal : Senin, 3 September 2018
Pukul : 14.00 WITA

1. Bagaimana menurut anda tentang audit internal?

Informan : Kehadiran audit internal sangat baik. Artinya didalam pengendalian universitas menuju *good university* sangat mendukung dimana berbagai macam kebijakan yang tidak mestinya langsung ditangani langsung oleh pimpinan atas dalam hal ini rektor. Jadi sangat terbantu, seyognyanya spi befungsi di masing-masing universitas terutama didalam melakukan kebijakaaan-kebijakan atau peraturan-peraturan baru.

2. Apakah anda pernah mengalami permasalahan selama anda berprofesi sebagai auditor internal?

Informan : Tentu ada kendala selama saya berprofesi sebagai auditor internal yaitu jika pihak SPI meminta data kadang tidak diberikan dan ketika memberikan saran kadang saran tersebut tidak didengarkan. Tapi selama niat kita untuk memperbaiki universitas , itu tidak menjadi masalah yang serius

3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan auditor internal mengalami masalah?

Informan : Mengenai faktor-faktor permasalahan ada tiga kendala yaitu sedang, ringan dan berat. Dimana ringannya itu adalah masih mempunyai SDM yang belum posisinya sebagai auditor. Contohnya kita sebagai dosen namun diberikan tugas bantuan sebagai tim pemeriksaan. Kendala sedangnya adalah dibagian aggarannya, dimana kadang kita ingin menambahkan SDM tapi anggarannya sangat minim apalagi kita sebagai PTNB. Dan kendala bertanya adalah ketika ada temuan yang ditemukan

oleh audit eksternal tapi audit internal tidak menemukan sehingga audit internal harus bekerja keras dimana titik kesalahan atau temuan tersebut

4. Bagaimana penerapan audit internal di Universitas Sulawesi Barat?

Informan : Penerapan audit internal ini belum maksimal tapi menuju kemaksimal karena kita masih PTNB dan kita ini bukan auditor terlatih. Kita hanya dibekali pelatihan-pelatihan untuk mengaudit seperti dasar-dasar untuk mengaudit, pemeriksaan dan *review*

5. Bagaimana menurut anda mengenai konsep *good university governance*?

Informan : Sangat bagus karena ini berdasarkan kemenristekdikti bahwasanya kita bisa menjadi Universitas dimana dapat memberikan pelayanan terdepan

6. Apakah konsep *good university governance* telah diterapkan dalam proses pengauditan di Unsulbar?

Informan : Pelaksanaan konsep *good university governance* ini belum secara maksimal walaupun visi misi mewujudkan perguruan tinggi yang baik.

7. Bagaimana peran audit internal dalam upaya mewujudkan *good university governance* di Universitas Sulawesi Barat ini?

Informan : Iya. Saya selalu berfikir bagaimana PTN ini bisa selevel dengan PTN yang sudah mapan, karena kita masih PTNB bagaimana supaya kita bisa beralih dari PTNB menjadi BLU atau PTNBH

Hasil Wawancara Informan

Nama : Muh. Yusran, S.Pd, M. Ak
Jabatan : Dosen Audit Universitas Sulawesi Barat
Tanggal : Senin, 10 September 2018
Pukul : 14.00 WITA

1. Bagaimana menurut bapak tentang audit internal?

Informan : Audit internal merupakan kebutuhan untuk akuntabilitas dalam organisasi. agar sebelum menemukan kendala yang berarti dia harus mengalami proses untuk melihat bagaimana kinerja organisasi dalam kurung waktu tertentu. Jangan sampai kesalahan-kesalahan dalam hal keuangan dan manajerial berakibat fatal, sehingga harus dibenahi sejak dini

2. Bagaimana penerapan audit internal di Universitas Sulawesi Barat?

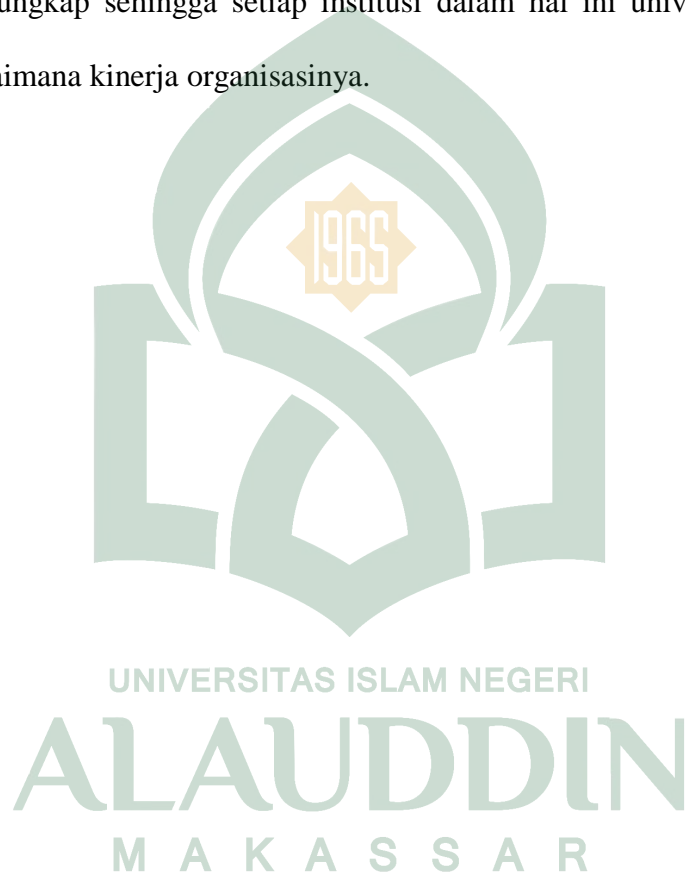
Informan : Audit internal dalam hal ini SPI baru efektif karena tidak berbarengan berdirinya Unsulbar secara keorganisasian dan kelembagaan. Tentu memang harus ada perbaikan dari sisi tata keorganisasian maupun sisi profesionalisme dan kompetensi anggotanya. Dari sisi praktik saya tidak bisa memberikan informasi yang banyak.

3. Bagaimana peran audit internal dalam upaya mewujudkan *good university governance*?

Informan : Secara kelembagaan harus diakui unsulbar adalah PTNB. Dia merupakan perlihan dari pengelolaan model swasta ke model negeri. Pasti penyesuaian itu terdapat masalah tapi didalam organisasi perlu waktu untuk membenahi dirinya. Sehingga dapat dilihat peran SPI kedepan bagaimana dia dapat memposisikan diri sebagai tim pengendali yang mengendalikan semua kinerja-kinerja organisasi baik kinerja operasional maupun kinerja keuangannya agar Unsulbar ini dapat mencapai apa yang dicita-citakan sesuai visi dan misinya.

4. Bagaimana bapak melihat fungsi audit internal ?

Informan : Berdasarkan visi misi yang dirumuskannya, tentu didalamnya auditor internal dia berfungsi sebagai pengendali, pengontrol, dan evaluator baik yang sifatnya kinerja operasional dan kinerja keuangannya. Jika semua syarat sudah dipenuhi sistem itu bisa bekerja dengan baik artinya tim evaluasi bekerja maupun yang ingin dievaluasi ada keterbukaan memberikan informasi ataupun profesional dalam bekerja, semuanya terevaluasi dengan akuntabel dan akan terungkap hal-hal yang perlu terungkap sehingga setiap institusi dalam hal ini universitas tentu bisa dievaluasi bagaimana kinerja organisasinya.



Hasil Wawancara Informan

Nama : Darmansyah
Jabatan : Mahasiswa Universitas Sulawesi Barat
Tanggal : Senin, 10 September 2018
Pukul : 13.30 WITA

1. Bagaimana menurut anda tentang audit internal?

Informan : Auditor internal kehadirannya sangat bagus karena dapat membantu perusahaan atau perguruan tinggi dalam sistem keuangannya

2. Menurut anda, apakah penerapan audit internal Unsulbar telah berjalan dengan baik?

Informan : Penerapan audit internal belum berjalan dengan baik, karena melihat apa yang terjadi dikampus sekarang masih banyak masalah-masalah yang belum teratasi

3. Apakah masalah itu berdampak kepada mahasiswa?

Informan : Tentu saja ini sangat berdampak bagi kami selaku mahasiswa, seperti yang terjadi karena tidak adanya ketidaktransparansian dalam pengelolaan anggaran sehingga dosen disini mogok mengajar dan kami sebagai mahasiswa tidak mendapat pelajaran yang seharusnya

4. Bagaimana menurut anda mengenai konsep *good university governance*?

Informan : sangat baik karena *good university governance* ini dapat meningkatkan budaya mutu pelayanan akademik maupun non akademik untuk perguruan tinggi tersebut.

5. Bagaimana pelaksanaan *good university governance* pada Universitas Sulawesi Barat?

Informan : Saya selaku mahasiswa melihat pelaksanaan *good university governance* belum berjalan dengan baik. Ini dilihat dari adanya ketidak relevannya dengan prinsip *good university governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas.

6. Bagaimana peran audit internal dalam upaya mewujudkan *good university governance* pada Universitas Sulawesi Barat?

Informan : Peran audit internal ini sangatlah penting apalagi dalam hal perbaikan tata kelola perguruan tinggi yang baik. jadi menurut saya selaku mahasiswa untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik harus dimulai dengan perbaikan akuntabilitas serta transparansi itu sendiri sehingga kepercayaan masyarakat juga akan bertambah apabila hal tersebut bisa berjalan.



Hasil Wawancara Informan

Nama : Misbah Sabaruddin
Jabatan : Pimpinan Redaksi Media Kampus
Tanggal : Minggu, 9 September 2018
Pukul : 12.20 WITA

1. Bagaimana menurut anda melihat audit internal di Unsulbar ?

Informan : Saya belum pernah berinteraksi langsung dengan SPI namun SPI pasti mempunyai peran tersendiri selain sebagai pengawas internal kampus dan memang kampus sangat perlu auditor internal dalam hal ini SPI dan bila perlu SPI rutin mengecek dan mengawal dengan baik anggaran yang keluar masuk

2. Apakah Unsulbar ini sudah menerapkan konsep *good university governance*?

Informan : Penerapannya belum terlaksana dengan baik, karena belajar dari peristiwa yang terjadi kemarin saat kami melakukan peliputan dilapangan mahasiswa mempertanyakan anggaran kampus dan juga mereka mengeluhkan bahwa UKT yang mereka bayarkan tidak sesuai dengan fasilitas yang dia dapatkan. Jadi, kalau saya melihat dari sudut pandang media, konsep *good university governance* ini belum diterapkan dengan baik

3. Bagaimana peran audit internal dalam upaya mewujudkan *good university governance* di Universitas Sulawesi Barat

Informan : Kembali lagi pada tujuan dibentuknya SPI ini untuk apa. Pasti untuk betul-betul sebagai pengawas kampus. Yah, kembali pada fitrahnya itu sendiri klo SPI betul-betul berkomitmen untuk mengawal masalah-masalah internalkan kampus terutama dalam pengelolaan anggaran saya kira kampus manapun pasti akan bisa mencapai gug. Intinya SPI harus berkomitmen pada tanggungjawab dan juga rasa sosial mereka untuk memajukan universitas

Hasil Wawancara Informan

Nama : Ridwan
Jabatan : LSM “Laskar Anti Korupsi”
Tanggal : Minggu, 16 September 2018
Pukul : 11.00 WITA

1. Bagaimana menurut bapa tentang audit internal itu?

Informan: Kehadiran auditor internal dalam hal ini SPI sangat bagus karena dalam sistem pengawasan internal harus dibutuhkan untuk bagaimana menjamin kelembagaan ini secara baik. Artinya dalam hal apapun itu misalnya agar audit tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran bagaimana manajemen kelembagaan supaya berjalan dengan bagus.

2. Bagaimana penerapan audit internal di Universitas Sulawesi Barat sejauh ini?

Informan: Belum berjalan dengan maksimal, terbukti dengan banyaknya masalah, misalnya dalam hal perencanaan keuangan. Contoh yang sekarang terjadi adanya bias-bias di Unsulbar ini mengenai masalah penggajian. Ini menandakan perencanaan di Unsulbar tidak berjalan, begitupula dengan SPInya tidak berjalan untuk memaksimalkan persoalan ini. Begitu juga dalam hal kepegawaian dalam hal ini tidak terlalu teratur, terbukti banyaknya pegawai-pegawai baru dan itu tidak sejalan dengan perencanaannya terutama pada masalah keuangannya dalam hal ini penggajian masih belum maksimal dan masih perlu dimaksimalkan

3. Apakah menimbulkan dampak pada tata kelola kampus?

Informan: Dampaknya sangat jelas yaitu adanya sistem perencanaan yang kacau balau, administrasi yang tidak teratur dan tidak menutup kemungkinan terjadi

penyimpangan-penyimpangan sebab ini dapat membuka celah karena SPI tidak berjalan dengan semestinya

4. Bagaimana menurut anda konsep *good university governance*?

Informan: Saya sangat mendukung sebab sudah jelas konsep-konsep transparansi dan akuntabilitas sangat bagus. Bagaimana dikampus tersebut adanya transparansi dalam hal kepegawaian, akademik, begitupun dengan keuangan. Ini sangat jelas sangat bagus dan dapat menutup celah adanya penyimpangan-penyimpangan.

5. Apakah di Unsulbar ini, konsep *good university governance* telah dilaksanakan?

Informan: Saya tidak terlalu faham tentang apa yang mereka lakukan di SPI sampai hari ini. Maksudnya, apakah mereka sudah melakukan sesuai dengan juknis yang diberikakan oleh tata laksana SPI itu sendiri tapi yang jelas kita bisa lihat fakta yang terjadi banyaknya bias-bias di Unsulbar. Tapi saya yakin bahwa mereka sudah sebenarnya menjalankan tugas hanya persoalannya masih belum maksimal dan inilah yang perlu menjadi acuan mereka bagaimana orang-orang yang terlibat didalam SPI ini adalah orang-orang yang akuntabel dan mereka harus mempunyai kompetensi dibidangnya. Bukan hanya mereka mencari orang karena faktor kedekatan, atau faktor yang lain sehingga mereka ada didalamnya. Karena SPI itu harus betul-betul independen

6. Bagaimana peran audit internal dalam upaya mewujudkan *good university governance* di Univesitas Sulawesi Barat?

Informan: Secara bagusnyanya seharusnya mereka berjalan sampai tidak akan ada riak-riak, kalau SPI berjalan dengan baik pasti tidak ada riak-riak. Tapi pada saat tidak berjalan dengan baik pasti akan ada riak-riak. Dan ini menandakan adanya tata kelola yang tidak bagus . dan berbicara tentang adanya celah-celah, seandainya

SPI sudah berjalan dengan semestinya pada saat perencanaan contoh masalah kepegawaian yang sudah jelas terarah. Setiap tahun misalnya sekian kita punya pegawai, ini tidak boleh bertambah dan harus jelas dan terencana. Jadi peran audit internal ini sangat penting dan harus jelas bagaimana dia mengaudit keuangan, kepegawaian, bagaimana administrasi dan bagaimana administrasi kampus

7. Apa saran/harapan LSM kedepannya terhadap universitas sulawesi barat?

Informan: Unsulbar ini sangat luar bisa, unsulbar ini adalah salah satu universitas negeri yang baru yang dimana mata masyarakat menuju ke kita dalam hal ini unsulbar bagaimana kita membangun SDM yang bagus. Harapan saya agar SPI harus berjalan dengan efektif, berjalan dengan maksimal. Yang kedua orang-orang yang masuk kedalam SPI itu adalah orang yang mempunyai kompetensi dan mempunyai integritas yang bagus. Jangan hanya memikirkan kepentingan individu, karena kita disini bagaimana kita membangun universitas kearah yang lebih bagus setara dengan Universitas Hasanuddin, UGM , Universitas Indonesia, dll.



Dokumentasi Penelitian



\

(Wawancara dengan Bapak Muh. Yusran, S.Pd., M. Ak)



(Wawancara dengan Misbah Sabaruddin)



(Wawancara dengan Darmawansyah)



(Wawancara dengan Bapak Ridwan)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 5305 /EB.I/PP.00.9/7/2018
Sifat : Penting
Lampiran: -
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Gowa, 26 Juli 2018

Kepada,

Yth. KESBANGPOL Kab. Majene

di tempat

Assalamu Alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Iin Ekasawitry**
NIM : 90400114105
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN Mega Rezky

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya:

“Good University Governance: Peran Audit Internal (Studi pada Universitas Sulawesi Barat)”

Dengan Dosen pembimbing:

1. Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak.
2. Muh. Akil Rahman, SE., M.SI

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di Universitas Sulawesi Barat, Kab. Majene.

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19681022 198703 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di SamataGowa
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat

Telp/Fax : (0422) 22357

Website: <http://unsulbar.ac.id>

Nomor : 429/UN55.1/DN.01/2018

29 September 2018

Hal : Penyampaian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Alauddin Makassar
Makassar

Menindaklanjuti Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesbang dan Politik Pemerintahan Kabupaten Majene Nomor: 070/311/BKBP/VIII/2018 Tanggal 24 Agustus 2018, maka kami sampaikan bahwa:

Nama : IIN EKASAWITRY
Stambuk : 90400114105
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Judul Penelitian : Good University Governance: Peran Audit Internal (Studi pada Universitas Sulawesi Barat)

benar telah menyelesaikan penelitiannya di Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat selama bulan Agustus hingga September 2018.

Demikian penyampaian ini, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,
Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama
ub.
Kepala Biro Akademik dan Umum


Drs. Abdul Latif Dollah, MM
NIP 196312311990031013

Tembusan:

1. Rektor sebagai laporan
2. Dekan Fakultas Ekonomi
3. Rektor UIN Alauddin Makassar
4. Peringgal

RIWAYAT HIDUP



Iin Ekasawitry, lahir di Tinambung, Sulawesi Barat pada tanggal 23 Juni 1997. Penulis merupakan anak pertama dari tempat bersaudara, buah hati dari Ayahanda Mujahidin dan Ibunda Zamrah. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 003 Kandeapi pada tahun 2002 hingga 2008, selanjutnya melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tinambung pada tahun 2008 hingga tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis juga melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tinambung hingga tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi. Selain mengikuti proses perkuliahan, penulis juga pernah bergabung dalam organisasi kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi UIN Alauddin Makassar periode 2014-2015 sebagai anggota pengembangan minat dan bakat.

Contact Person:

Email : iinekasawitry23@gmail.com

No. Hp : 0822-3952-5772

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R